



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 - 2025**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
"Planning for a better Babel"



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 - b. bahwa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 telah dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan hasil terdapat perubahan indikator kinerja pembangunan dan perlu untuk diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, rencana pembangunan daerah dapat diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
18. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

22. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
24. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
25. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II PERUBAHAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dalam Perubahan RPJPD yang berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari perubahan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Penyusunan RPJMD Provinsi.
- b. Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Sistematika Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

- Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis;
Bab IV : Visi, Misi Daerah;
Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
Bab VI : Kaidah Pelaksanaan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan;
- c. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan RPJPD, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRWP.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan RPJPD telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sepanjang periode pembangunan 2005-2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

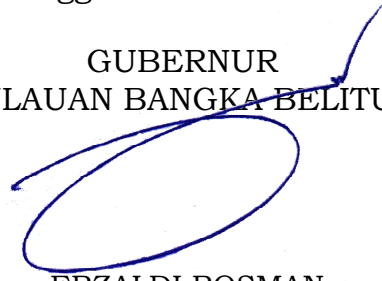
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2017 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (3/84/2017)



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1.Latar Belakang	I.1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	I.7
1.3.Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I.9
1.4.Sistematika Penulisan	I.12
1.5.Maksud dan Tujuan	I.11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II
2.1. Aspek Geografidan Demografi	II.1
a. Karakteristik lokasi dan wilayah	II.1
b. Potensi pengembangan wilayah	II.7
c. Wilayah rawan bencana	II.15
d. Demografi	II.17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.19
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	II.19
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.30
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II.48
2.2.3.1. Kebudayaan	II.48
2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga	II.49
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II.53
2.3.1. Fokus layanananuru sanwajib.....	II.53

	Halaman
2.3.1.1. Urusan Pendidikan	II.53
2.3.1.2. Urusan Kesehatan.....	II.59
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.67
2.3.1.4. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	II.71
2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	II.71
2.3.1.6. Urusan Sosial.....	II.72
2.3.1.7. Urusan Tenaga Kerja.....	II.73
2.3.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.77
2.3.1.9. Urusan Pangan	II.81
2.3.1.10. Urusan Pertanahan	II.83
2.3.1.11. Urusan Lingkungan Hidup.....	II.87
2.3.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.88
2.3.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II.89
2.3.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.90
2.3.1.15. Urusan Perhubungan.....	II.93
2.3.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika	II.95
2.3.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II.95
2.3.1.18. Urusan Penanaman Modal	II.96
2.3.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II.97
2.3.1.20. Urusan Statistik	II.98
2.3.1.21. Urusan Kebudayaan	II.98
2.3.1.22. Urusan Perpustakaan	II.98
2.3.1.23. Urusan Kearsipan.....	II.99
2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan.....	II.99
2.3.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan	II.99

	Halaman
2.3.2.2. Urusan Pariwisata	II.102
2.3.2.3. Urusan Pertanian	II.103
2.3.2.4. Urusan Kehutanan	II.105
2.3.2.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II.105
2.3.2.6. Urusan Perdagangan	II.106
2.3.2.7. Urusan Perindustrian	II.107
2.3.2.8. Urusan Transmigrasi	II.108
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II.109
2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah	II.109
2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur	II.112
2.4.3. Fokus iklim berinvestasi.....	II.114
2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia.....	II.118
2.5. Evaluasi Ketercapaian Indikator RPJPD.....	II.120
2.6. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPJPD Sampai dengan Tahun 2015.....	II.124
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	III
3.1. Permasalahan Pembangunan.....	III.1
3.1.1. Urusan Wajib.....	III.1
3.1.1.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	III.1
a. Urusan Pendidikan	III.1
b. Urusan Kesehatan	III.2
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.2
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	III.3
e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	III.3
f. Urusan Sosial	III.4
3.1.1.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	III.5
a. Urusan Tenaga Kerja	III.5

Halaman

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III.5
c. Urusan Pangan	III.6
d. Urusan Pertanahan	III.6
e. Urusan Lingkungan Hidup	III.7
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III.7
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III.7
h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.8
i. Urusan Perhubungan.....	III.8
j. Urusan Komunikasi dan Informatika	III.8
k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III.9
l. Urusan Penanaman Modal	III.9
m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III.10
n. Urusan Persandian	III.10
o. Urusan Kebudayaan	III.10
p. Urusan Perpustakaan	III.11
q. Urusan Kearsipan	III.11
3.1.2. Urusan Pilihan	III.11
a. Urusan Kelautan dan Perikanan	III.11
b. Urusan Pariwisata	III.12
c. Urusan Pertanian	III.12
d. Urusan Kehutanan	III.13
e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	III.13
f. Urusan Perdagangan	III.14
g. Urusan Perindustrian	III.14
h. Urusan Transmigrasi	III.14
3.2. Isu Strategis.....	III.15



	Halaman
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV
4.1. Visi	IV.1
4.2. Misi	IV.3
4.3. Tujuan dan Sasaran	IV.5
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	V
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V.1
5.2. Tahapan dan Prioritas	V.13
5.2.1. Tahun 2005–2012 (Tahap Pertama)	V.15
5.2.2. Tahun 2012–2017 (Tahap Kedua)	V.15
5.2.3. Tahun 2017–2022 (Tahap Ketiga)	V.16
5.2.4. Tahun 2022–2025 (Tahap Keempat)	V.19
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	VI.1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1.a	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 II.1
Tabel II.1.b	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 ... II.2
Tabel II.1.c	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 II.2
Tabel II.1.d	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015.... II.3
Tabel II.2	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung II.6
Tabel II.3	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030–KVA II.10
Tabel II.4	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 (sst) II.11
Tabel II.5	Data Bencana Alam Tahun 2013 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.16
Tabel II.6	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.16
Tabel II.7	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011–2015 II.18
Tabel II.8	Perkembangan PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar) .. II.19
Tabel II.9	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011 – 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar) II.22
Tabel II.10	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar) II.22



Tabel II.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.23
Tabel II.12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.24
Tabel II.13	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.25
Tabel II.14	Perkembangan PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II.26
Tabel II.15	Laju Inflasi Tahun 2011-2015 Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran.....	II.27
Tabel II.16	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.30
Tabel II.17	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.31
Tabel II.18	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.32
Tabel II.19	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.33
Tabel II.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.35
Tabel II.21	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.36
Tabel II.22	Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.39
Tabel II.23	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.40
Tabel II.24	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.41



		Halaman
Tabel	II.25	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.42
Tabel	II.26	Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.43
Tabel	II.27	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.43
Tabel	II.28	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.44
Tabel	II.29	Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.44
Tabel	II.30	Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2015 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera II.45
Tabel	II.31	Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 II.45
Tabel	II.32	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.46
Tabel	II.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47
Tabel	II.34	Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2011 s.d 2015 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48
Tabel	II.35	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49
Tabel	II.36	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49
Tabel	II.37	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.50
Tabel	II.38	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.50
Tabel	II.39	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.51
Tabel	II.40	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.51



	Halaman
Tabel II.41 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.51
Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.52
Tabel II.43 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.52
Tabel II.44 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.53
Tabel II.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.54
Tabel II.46 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.56
Tabel II.47 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.57
Tabel II.48 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.58
Tabel II.49 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.58
Tabel II.50 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.59
Tabel II.51 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.60
Tabel II.52 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.60
Tabel II.53 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.61
Tabel II.54 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.61
Tabel II.55 Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.62

Tabel II.56	Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.62
Tabel II.57	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.63
Tabel II.58	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.64
Tabel II.59	Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.65
Tabel II.60	Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.68
Tabel II.61	Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.69
Tabel II.62	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015.....	II.70
Tabel II.63	Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015.....	II.70
Tabel II.64	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.71
Tabel II.65	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.71
Tabel II.66	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.72
Tabel II.67	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.72
Tabel II.68	Perkembangan Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.73
Tabel II.69	Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.74



		Halaman	
Tabel	II.70	Data TPAK Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.75
Tabel	II.71	Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.75
Tabel	II.72	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.76
Tabel	II.73	Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.77
Tabel	II.74	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.77
Tabel	II.75	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.78
Tabel	II.76	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.79
Tabel	II.77	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.79
Tabel	II.78	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.80
Tabel	II.79	Data Ketergantungan Beras 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.81
Tabel	II.80	Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2012-215 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.81
Tabel	II.81	Data Ketersediaan Pangan 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.82
Tabel	II.82	Luas Lahan (m ²) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013	II.81
Tabel	II.83	Luas Lahan (m ²) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016	II.81
Tabel	II.84	Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013.....	II.82
Tabel	II.85	Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.85
Tabel	II.86	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016	II.86



			Halaman
Tabel	II.87	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.87
Tabel	II.88	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.87
Tabel	II.89	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk.....	II.88
Tabel	II.90	Kepemilikan KTP	II.88
Tabel	II.91	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk.....	II.88
Tabel	II.92	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.....	II.88
Tabel	II.93	Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.89
Tabel	II.94	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.90
Tabel	II.95	Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.91
Tabel	II.96	Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.91
Tabel	II.97	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.92
Tabel	II.98	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.94
Tabel	II.99	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.94
Tabel	II.100	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.95
Tabel	II.101	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.96
Tabel	II.102	Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.96
Tabel	II.103	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.97



	Halaman
Tabel II.104 Jumlah Klub/Organisasi Olah raga Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.97
Tabel II.105 Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.98
Tabel II.106 Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d 2015 Kepulauan Bangka Belitung	II.99
Tabel II.107 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014	II.100
Tabel II.108 Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.107
Tabel II.109 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 – 2014.	II.103
Tabel II.110 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.104
Tabel II.111 Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.105
Tabel II.112 Potensi Bahan Galian Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.106
Tabel II.113 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.107
Tabel II.114 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.108
Tabel II.115 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 s.d 2015P rovinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.109
Tabel II.116 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.110
Tabel II.117 Persentase Konsumsi RTN Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.111
Tabel II.118 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.111
Tabel II.119 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.112
Tabel II.120 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.112

	Halaman
Tabel II.121 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.113
Tabel II.122 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.113
Tabel II.123 Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.114
Tabel II.124 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016.....	II.115
Tabel II.125 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016	II.115
Tabel II.126 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II.116
Tabel II.127 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta).....	II.117
Tabel II.128 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi	II.118
Tabel II.129 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.119
Tabel II.130 Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.120
Tabel II.131 Capaian Dan Target Indikator Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025	II.121
Tabel II.132 Capaian Dan Target Indikator Peningkatan Kualitas SDM RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025	II.121
Tabel II.133 Capaian dan Target Indikator Misi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025	II.122
Tabel II.134 Capaian Dan Target Indikator Pemerataan Pembangunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025	II.124
Tabel II.135 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadapPerencanaan Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.125



	Halaman
Tabel II.136 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.128
Tabel II.137 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.145
Tabel IV.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah	IV.5
Tabel IV.2 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.8
Tabel V.1 Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025.....	V.1
Tabel V.2 Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025.....	V.10
Tabel V.3 Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V.14
Tabel V.4 Sasaran Pokok dan Target Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 -2025.....	V.23

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	I.1	Proses dan Tahapan Penyusunan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.....	I.6
Gambar	II.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.4
Gambar	II.2	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.12
Gambar	II.3	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.14
Gambar	II.4	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II.16
Gambar	II.5	Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2015.....	II.17
Gambar	II.6	Perkembangan PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II.20
Gambar	II.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.21
Gambar	II.8	Laju Inflasi Tahun 2011-2015 Kota Pangkalpinang	II.26
Gambar	II.9	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2011-2015 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional .	II.27
Gambar	II.10	PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.28
Gambar	II.11	Indeks Gini Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.29
Gambar	II.12	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.29
Gambar	II.13	Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.30
Gambar	II.14	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.32

			Halaman
Gambar	II.15	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.34
Gambar	II.16	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.47
Gambar	II.17	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.54
Gambar	II.18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.55
Gambar	II.19	Presentase Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.68
Gambar	II.20	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.74
Gambar	II.21	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.80
Gambar	II.22	Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II.92
Gambar	II.23	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015	II.93
Gambar	II.24	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung	II.102

Lampiran
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 3 Tahun 2017
Tanggal 29 Mei 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun Perencanaan Jangka Panjang (dua puluh tahun) yang sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Didalam regulasi yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Di tataran nasional, melalui Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 yaitu: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang harus diimplementasikan. Adapun misi pembangunan jangka panjang nasional tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Pada periode tahun 2017-2022, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memasuki fase ketiga dalam pelaksanaannya yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan RPJPD, banyak perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya dinamika pembangunan yang sangat cepat mengalami perubahan yang diindikasikan dengan terjadinya beberapa perubahan kebijakan secara nasional, sejak diundangkan pada tahun 2007,

Perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi yang juga berimplikasi pada arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

Demikian halnya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, telah pula menyebabkan berubahnya kebijakan tentang struktur dan pola ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu disisi yang lain, terjadinya pergeseran struktur perekonomian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Beberapa hal tersebut, menyebabkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada tahun 2007 yang lalu, tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang saat ini dihadapi. Hal tersebut juga berkorelasi terhadap analisa arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah disusun, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa perlu untuk melakukan *review* melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD tersebut. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistematika yang digunakan dalam dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
2. RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 disusun belum selaras dengan RTRW;
3. Terdapat beberapa indikator didalam RPJPD 2005-2025 yang sudah tidak relevan dengan indikator pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
4. Beberapa realisasi dari target indikator RPJPD telah melampaui target, sementara itu disisi lain masih terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, yang mendasari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan perubahan terhadap

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025. Secara normatif, perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 282 ayat (1) huruf a, b dan c, yang menjelaskan bahwa perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses perumusan dan/atau substansi selama pelaksanaan RPJPD menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan terjadi perubahan yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 282 ayat (2). Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan kebijakan nasional.

Penyusunan Perubahan RPJPD tetap dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan perencanaan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu: teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan politik memandang bahwa dalam proses penentuan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang perlu mengakomodasi masukan dari Kepala Daerah dan DPRD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, yang dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda dengan mendapatkan masukan dari kalangan akademisi. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dilakukan untuk:

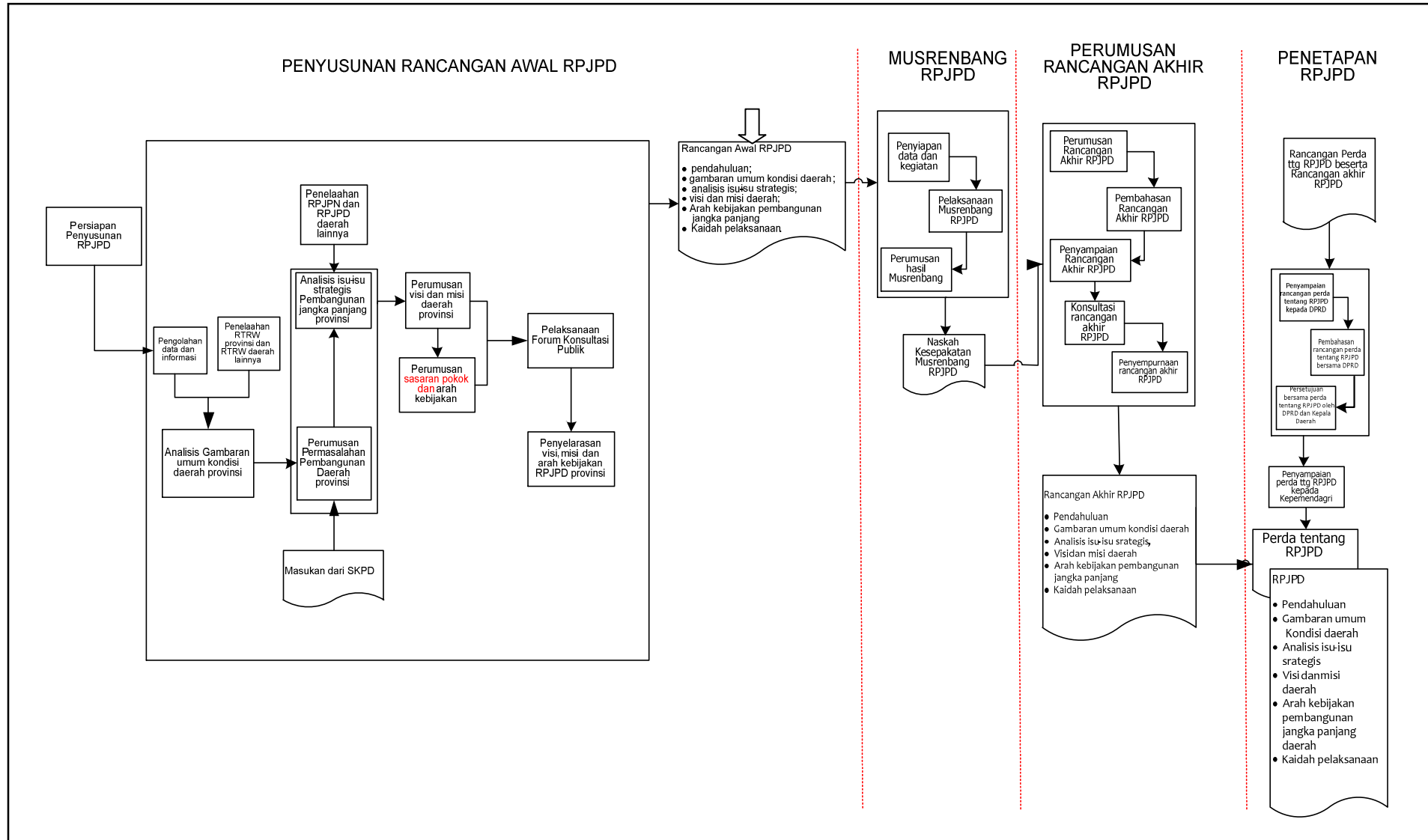
1. Penyelarasan terhadap Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil RPJPD, mencakup kebijakan di tingkat nasional dan daerah;
2. Penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
3. Penyesuaian terhadap isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran pokok, indikator kinerja sasaran pokok dan arah kebijakan;

Keberhasilan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Secara prinsip, proses dan tahapan penyusunan perubahan RPJPD tetap dilakukan sebagaimana yang diamanatkan didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun proses dan tahapan yang dilakukan, adalah sebagaimana yang termuat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Proses dan Tahapan Penyusunan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perubahan RJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 disusun tetap dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Berpedoman pada RPJPN, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Sementara itu, berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bab ini juga memuat hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB IV VISI dan MISI DAERAH

Berisikan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 20 (dua puluh) tahun.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Berisi sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi, serta tahapan dan prioritas.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud:

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan Pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan visi serta misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 20 (dua puluh) tahun;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam Pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Aspek Geografi dan Demografi****a. Karakteristik lokasi dan wilayah****1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Luas wilayah mencapai 81.725,23 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1.a-II.1.d dan Gambar II.1.

Tabel II.1.a

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	7	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kep. Babel		46	47	47	47	47

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2015

Dari Tabel II.1.a di atas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi kecamatan yang paling banyak adalah kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing kabupaten tersebut 8 kecamatan. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi kecamatannya adalah kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Total seluruh Kecamatan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 Kecamatan.

Tabel II.1.b

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	61	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	50	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	46	48	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kep. Babel		306	313	309	309	309

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2015

Dari Tabel II.1.b di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa yang paling banyak adalah kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa. Total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 309 Desa.

Tabel II.1.c

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	9	9	9	15	15
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2	2	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kep. Babel		67	67	72	78	78

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2015

Dari Tabel II.1.c di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel II.1.d

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kep. Babel		81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2015

Dari Tabel II.1.d di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Luas wilayah Administrasi yang paling besar adalah kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,69 Km². Dan kabupaten

yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota pangkalpinang sebesar 118,8 Km². Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas lautan 65.301,23 Km² dan Luas daratan 16.424,23 Km².

Gambar II.1.

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi ini secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

3) Topografi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

4) Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*), dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup

terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain : Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak dimanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.2. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel II.2.

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas(Ha)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	749.220	21.662	23.042	13.262	15.719	15.719
Tegalan	118.651	138.246	112.777	109.820	113.105	113.105
Ladang	45.716	45.984	48.960	44.085	30.348	30.348
Perkebunan	307.326	331.662	332.179	334.698	441.152	441.152
Hutan Rakyat	90.924	72.517	85.738	71.323	47.753	47.753

Jenis Penggunaan Lahan	Luas(Ha)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tambak	683	*	*	*	*	*
Kolam	743	*	*	*	*	*
Pengembalaan	7.035	8.037	6.086	4.235	1.815	1.815
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	113.566	122.309	121.407	126.272	76.588	76.588
Lain-Lain (pekarangan)	46.607	435.971	387.443	388.068	397.806	397.806
Permukiman	131484	476.857	526.303	550.651	517.741	517.741
Hutan Negara	394.641	*	*	*	*	*
Rawa	102.321	*	*	*	*	*
Lainnya	264.748	*	*	*	*	*
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2016

(*: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1) Rencana Struktur Ruang

a) Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

b) Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan;
2. Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran; dan
3. Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang udara.

c) Sistem Transportasi Darat

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

d) Sistem Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran.

e) Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari : a. bandar udara pengumpul (*hub*) dan b. bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan.

f) Rencana Jaringan Energi

Sampai saat ini belum seluruh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dialiri listrik PLN (48,3 % telah dialiri), dan juga belum seluruh desa telah dialiri listrik PLN (79,6 % telah dialiri). Dengan kondisi masih banyaknya rumah tangga dan desa yang belum dialiri listrik PLN, beban puncak energi listrik PLN terhadap daya mampu pembangkit yang tersedia telah mencapai 94,5 %, hal ini berarti daya mampu yang tersedia (69.320 KW) hampir seluruhnya terpakai pada saat beban puncak yaitu 65.520 KW.

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman untuk mendukung kegiatan perekonomian, serta pengembangan kawasan. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Kedepannya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3

Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
	JUMLAH	477.159	507.309	553.487	603.875	654.842
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
	JUMLAH	146.283	152.588	161.327	170.566	181.919
	JUMLAH TOTAL	623.442	659.897	714.814	774.441	836.761

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010

g) Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut :

1. 4 (Empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (Dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
dan

3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan umum dan komersil : 15 % dari domestik
2. Wartel : 250 jiwa per wartel
3. Telepon Umum : 800 jiwa per unit

Kedepannya seiring dengan penambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4

Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 (sst)

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	112.683	124.942	136.315	148.724	158.861
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	33.451	34.830	36.825	38.934	40.986
	JUMLAH TOTAL	146.134	159.772	173.140	187.658	199.847

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

h) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota yaitu WS Belitung;

- b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
- d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai.

i) Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat perosesan akhir sampah (TPA Regional), tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah indsutri bahan beracun berbahaya dan nn beracun berbahaya, sistem drainase, sistem pengelolaan air minun (SPAM) dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

Gambar II.2

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

j) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2) Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan; kawasan cagar budaya serta;
- kawasan rawan bencana alam.

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kep. Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 Ha, dimana 32% diantaranya (atau 156.730 Ha) merupakan kawasan hutan lindung.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah berupa kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

Sempadan Pantai; sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau besar bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Kawasan Cagar Alam; berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat

cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang - Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung

Taman Wisata Alam Laut; di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

Kawasan Suaka Alam Laut ; dan perairan lainnya adalah kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

3) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari:

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan pertanian;
3. kawasan peruntukan perikanan;
4. kawasan peruntukan pertambangan;
5. kawasan peruntukan industri;
6. kawasan peruntukan pariwisata; dan
7. kawasan peruntukan permukiman.
8. Kawasan peruntukan lainnya

Gambar II.3

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

a) Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5
Data Bencana Alam Tahun 2013
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindahkan	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	20	0	0	0	936	0	0	0	0	0	0
Kebakaran	125	4	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Kabut asap	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angin puting beliung	26	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
Tersambar petir	3	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0
KLB DBD	3	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerusuhan	1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Jumlah	192	14	0	0	135	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2014

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi 20 (dua puluh) kejadian dengan korban sebanyak 936 korban
2. Bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran yaitu 125 kejadian terutama terjadi pada musim kemarau.tercatat jumlah korban pada bencana tersebut 120 orang.

Tabel II.6.

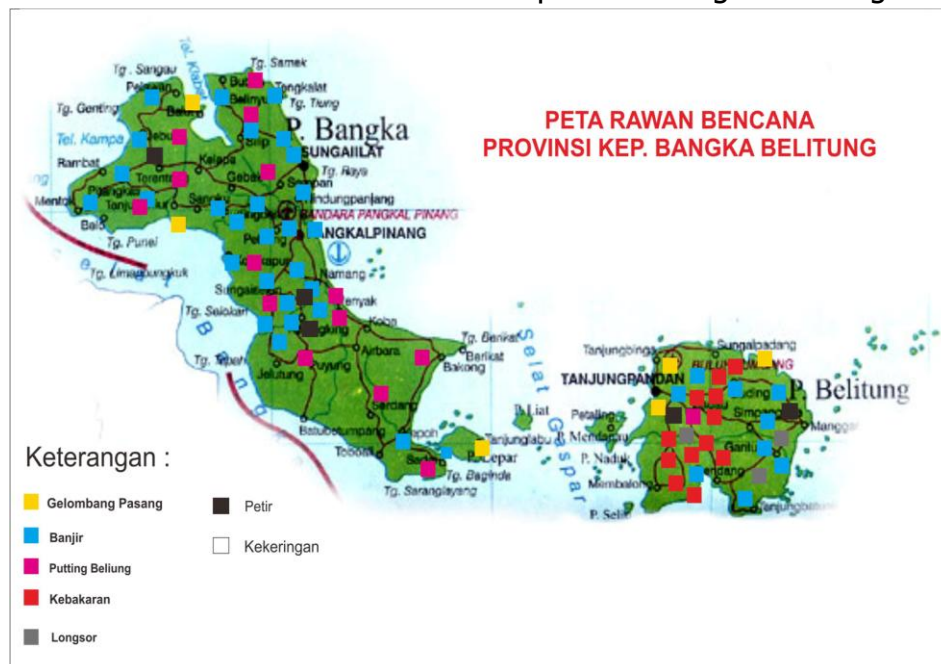
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, pergerakan tanah	Rendah
3	Bangka Selatan	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
5	Belitung	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Rendah, sedang
7	Pangkalpinang	Banjir, puting beliung	Rendah, sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014

Gambar II.4

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

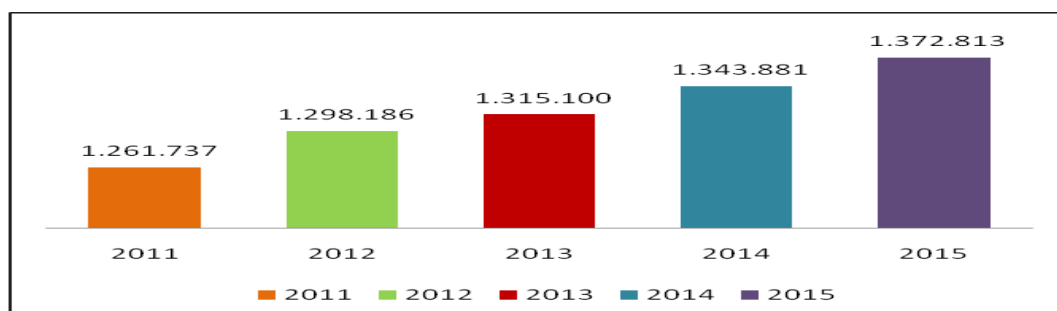


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014

d. Demografi

Dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 3,52 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Gambar II.5
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 - 2015



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.372.813 pada tahun 2015. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 4,52 persen pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.7).

Tabel II.7.
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011–2015

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bangka	285.915	294.003	298.013	304.485	311.085	3,11	2,02	2,21	2,17	2,22	97	100	101	103	105
Belitung	160.866	163.871	167.602	171.271	175.048	2,36	2,21	2,21	2,19	2,23	70	71	73	75	76
Bangka Barat	180.654	188.376	188.271	192.395	196.598	3,35	2,19	2,19	2,19	2,22	64	67	67	68	70
Bangka Tengah	166.294	170.033	173.346	177.218	180.903	3,81	2,23	2,23	2,23	2,21	78	80	82	83	85
Bangka Selatan	177.949	183.486	185.514	189.492	193.583	3,11	2,25	2,25	2,14	2,22	49	51	51	53	54
Belitung Timur	109.809	112.569	114.469	117.026	119.394	2,76	2,24	2,24	2,23	2,21	44	45	46	47	48
Pangkalpinang	180.250	185.830	187.908	191.994	196.202	3,40	2,24	2,24	2,17	2,22	1.517	1564	1.582	1.616	1.652
Kepulauan Bangka Belitung	1.261.737	1.298.168	1.315.123	1.343.881	1.372.813	3,14	2,22	2,22	2,19	2,22	77	79	80	82	84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011-2015

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011-2015 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 sebesar 77 jiwa per km², tahun 2012 sebesar 79 jiwa per km², tahun 2013 sebesar 80 jiwa per km², tahun 2014 sebesar 82 jiwa per km² dan tahun 2015 sebesar 84 jiwa per km². Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan melihat kepadatan penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat dengan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeksgini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2011 – 2015, sebagaimana terlihat pada tabel II.7 dihalaman berikut.

Tabel II.8

Perkembangan PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

No.	PDRB	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	40.849,0	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	38.014,0	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Secara nominal nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yaitu sebesar Rp. 40.849,0 Milyar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 60.992,1 Milyar pada tahun 2015 atau rata-rata tumbuh sebesar 10,55 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 hanya sebesar Rp. 38.014,0 Milyar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 45.961,5 Milyar pada tahun 2015 atau rata-rata tumbuh sebesar 4,86 persen.

Gambar II.6

Perkembangan PDRB Tahun 2011 – 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

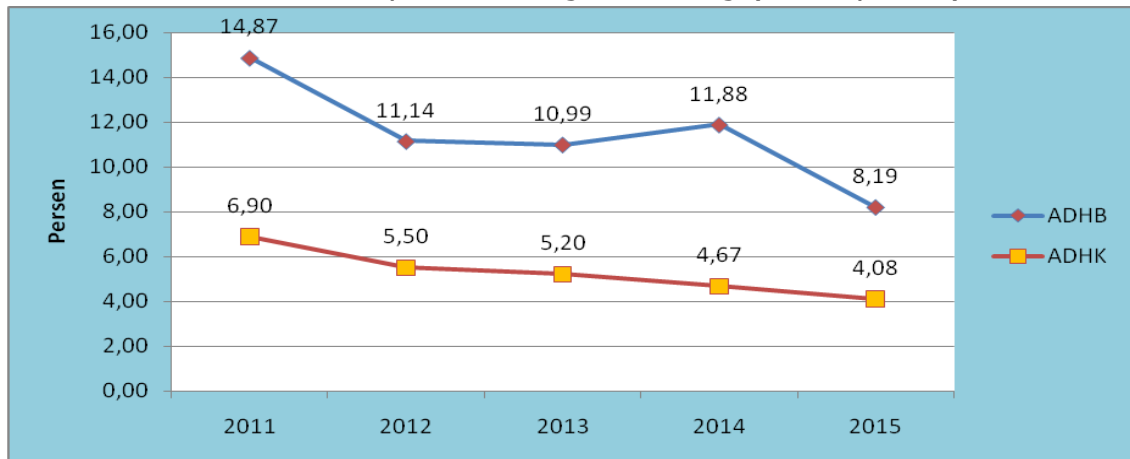


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sepanjang kurun waktu 2011 – 2015 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami trend perlambatan, baik dihitung berdasarkan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Tahun 2010. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar II.2, menunjukkan bahwa trend perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini mulai terlihat pada tahun 2012, di mana laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB mencapai sebesar 11,14 persen dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai sebesar 5,50 persen. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai sebesar 14,87 persen berdasarkan ADHB dan mencapai sebesar 6,90 persen berdasarkan ADHK Tahun 2010. Trend penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2015, dimana laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan ADHB hanya sebesar 8,19 persen dan berdasarkan ADHK Tahun 2010 hanya mencapai sebesar 4,08 persen.

Gambar II.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi, dan hanya sektor konstruksi yang menunjukkan peningkatan, namun sektor ekonomi ini tidak cukup mampu untuk menahan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, sepanjang periode tahun 2013 – 2015 meskipun setengah dari 17 sektor ekonomi yang ada telah mengalami pertumbuhan, namun laju pertumbuhannya relatif masih lambat sehingga belum mampu menahan laju perlambatan ekonomi.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel II.9 dan tabel II.10. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan merupakan 3 (tiga) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Tahun 2010, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 10.321,9 Milyar dan meningkat menjadi sebesar 12.885,3 Milyar pada tahun 2015. Pada periode yang sama nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai sebesar Rp. 7.070,6 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 12.000,8 Milyar. Sedangkan untuk sektor sektor pertambangan dan penggalian mencapai sebesar Rp. 6.819,2 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 7.738,5 Milyar.

Tabel II.9Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011 – 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7 070,6	8 111,9	9 269,6	10 834,4	12 000,8
B. Pertambangan dan Penggalian	6 810,2	6 975,3	7 097,6	7 622,6	7 738,5
C. Industri Pengolahan	10 321,9	11 043,8	12 088,2	12 883,0	12 885,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26,2	27,1	27,3	41,2	48,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,3	8,2	9,1	10,4	12,1
F. Konstruksi	2 927,1	3 523,1	4 139,3	4 711,0	5 291,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	5 447,8	6 193,5	6 671,7	7 571,5	8 602,1
H. Transportasi dan Pergudangan	1 349,9	1 577,2	1 864,6	2 129,0	2 463,0
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	852,2	992,6	1 152,1	1 321,4	1 459,4
J. Informasi dan Komunikasi	643,4	708,6	770,2	849,1	940,7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	615,8	728,8	902,4	998,5	1 086,1
L. Real Estate	1 178,2	1 388,3	1 602,9	1 836,6	1 981,6
M, N. Jasa Perusahaan	99,9	116,1	134,4	154,0	169,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 993,8	2 243,5	2 618,0	3 042,8	3 524,1
P. Jasa Pendidikan	824,0	998,0	1 172,2	1 366,5	1 649,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	417,3	487,6	552,7	629,9	712,4
R,S,T,U. Jasa Lainnya	242,4	276,7	315,9	371,7	426,3
PDRB	40 849,0	45 400,2	50 388,4	56 373,6	60 992,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, nilai PDRB sektor industri pengolahan mencapai sebesar Rp. 9.515,8 Milyar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 10.414,0 Milyar pada tahun 2015. Untuk nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama mencapai sebesar Rp. 6.642,8 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 8.737,9 Milyar. Sedangkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai sebesar Rp. 6.263,6 Milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 6.464,4 Milyar.

Tabel II.10Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.642,8	7.072,9	7.557,7	8.254,2	8.737,9
B. Pertambangan dan Penggalian	6.263,6	6.270,1	6.230,2	6.354,1	6.464,4

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C. Industri Pengolahan	9.515,8	9.804,9	10.143,3	10.275,5	10.414,0
D. Pengadaan Listrik dan Gas	27,3	30,1	31,5	34,5	36,4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	6,6	7,0	7,3	7,7	8,1
F. Konstruksi	2.758,3	3.133,8	3.414,7	3.551,4	3.748,0
G. Perdagangan Besar dan EceranMotor	5.162,1	5.528,1	5.846,6	6.106,0	6.354,8
H. Transportasi dan Pergudangan	1.272,7	1.384,8	1.484,8	1.573,3	1.664,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	808,4	871,0	931,0	1.000,6	1.034,8
J. Informasi dan Komunikasi	625,2	679,2	740,2	790,9	849,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	581,5	624,2	728,3	766,6	800,0
L. Real Estate	1.098,4	1.215,7	1.312,6	1.414,0	1.454,4
M, N. Jasa Perusahaan	93,9	101,2	108,1	115,7	120,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.778,0	1.873,0	2.014,4	2.162,1	2.373,5
P. Jasa Pendidikan	755,5	821,7	903,7	967,6	1.061,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	397,5	442,9	475,3	503,8	535,1
R,S,T,U Jasa Lainnya	226,5	244,3	261,0	281,7	304,6
PDRB	38.014,0	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dengan demikian, kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.11, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, rata-rata kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 56,47 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 23,51 persen merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder dan sebesar 32,96 persen merupakan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer dalam perekonomian daerah.

Tabel II.11

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015
Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,31	17,87	18,39	19,22	19,68
B. Pertambangan dan Penggalian	16,67	15,36	14,08	13,52	12,69
C. Industri Pengolahan	25,27	24,33	23,99	22,85	21,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,07	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	7,17	7,76	8,21	8,36	8,67

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,41	13,64	13,24	13,43	14,10
H. Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,47	3,70	3,78	4,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,19	2,29	2,34	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	1,55	1,56	1,53	1,51	1,54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,60	1,79	1,77	1,78
L. Real Estate	2,88	3,06	3,18	3,26	3,25
M, N. Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,27	0,27	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88	4,94	5,20	5,40	5,78
P. Jasa Pendidikan	2,02	2,20	2,33	2,42	2,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,07	1,10	1,12	1,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,59	0,61	0,63	0,66	0,70
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.12, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 57,10 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 23,89 persen merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder dan sebesar 33,21 persen merupakan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer dalam perekonomian daerah.

Tabel II.12

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,47	17,64	17,91	18,69	19,01
B. Pertambangan dan Penggalian	16,48	15,63	14,77	14,39	14,07
C. Industri Pengolahan	25,03	24,45	24,04	23,27	22,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	7,26	7,81	8,09	8,04	8,15
G. Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,58	13,78	13,86	13,83	13,83
H. Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,45	3,52	3,56	3,62
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,13	2,17	2,21	2,26	2,25
J. Informasi dan Komunikasi	1,64	1,69	1,75	1,79	1,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58	1,56	1,73	1,74	1,74
L. Real Estate	2,89	3,03	3,11	3,20	3,16
M, N. Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,67	4,77	4,90	5,16

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P. Jasa Pendidikan	1,99	2,05	2,14	2,19	2,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,11	1,13	1,14	1,16
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.13, menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2011 – 2015 nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata hanya 0,53 persen dari nilai PDB. Hal ini berarti bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karenanya, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel II.13

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.554,0	8.321,7	9.127,7	10.119,4	10.949,1
Kabupaten Bangka Barat	7.639,8	8.525,0	9.521,0	10.566,8	11.468,5
Kabupaten Bangka Tengah	5.083,2	5.692,4	6.245,1	6.722,3	7.056,1
Kabupaten Bangka Selatan	4.741,3	5.277,0	5.820,0	6.429,8	6.935,4
Kabupaten Belitung	4.719,4	5.333,9	5.999,9	6.734,2	7.345,9
Kabupaten Belitung Timur	4.024,0	4.541,2	5.079,6	5.643,9	6.112,5
Kota Pangkalpinang	6.595,0	7.462,0	8.414,4	9.358,6	10.214,7
Provinsi Kep. Babel	40 849,0	45 400,2	50 393,9	56 389,8	60 992,1
Nasional	7.427.086,1	8.615.704,5	9.546.134,0	10.565.817,3	11.540.789,8

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.14, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional, yaitu hanya sebesar 0,52 persen dari PDB. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.14

Perkembangan PDRB Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.003,4	7.378,1	7.769,0	8.140,5	8.513,0
Kabupaten Bangka Barat	7.191,8	7.586,5	7.973,5	8.316,2	8.742,0
Kabupaten Bangka Tengah	4.773,1	5.012,8	5.223,9	5.303,1	5.271,8
Kabupaten Bangka Selatan	4.437,3	4.646,0	4.850,3	5.066,3	5.273,3
Kabupaten Belitung	4.389,1	4.656,4	4.933,8	5.166,5	5.401,3
Kabupaten Belitung Timur	3.798,7	4.028,4	4.257,7	4.474,8	4.673,0
Kota Pangkalpinang	6.193,0	8.571,3	6.951,4	7.248,0	7.551,3
Provinsi Kep. Babel	38.014,0	40.105,0	42.198,2	44.171,6	45.961,5
Nasional	7.256.158,7	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5

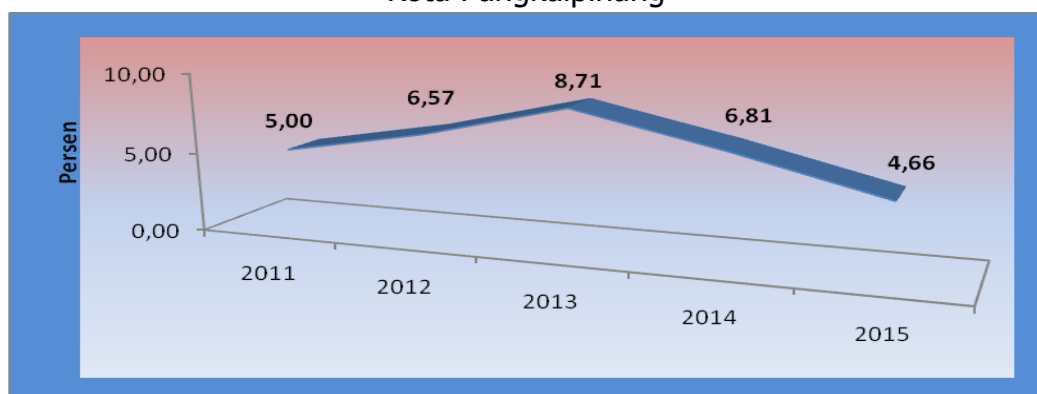
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

b. Laju Inflasi provinsi

Sepanjang periode tahun 2011-2015 inflasi Kota Pangkalpinang masih berada di bawah dua digit dengan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2011 tingkat inflasi berada pada angka 5,00 persen, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,57 persen dan di tahun 2013 terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,71 persen, namun pada tahun 2014 dan 2015 inflasi cenderung mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 6,81 persen dan 4,66 persen.

Gambar II.8

Laju Inflasi Tahun 2011-2015
Kota Pangkalpinang



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Gambaran mengenai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, adalah sebagaimana yang disajikan pada table II.15 berikut:

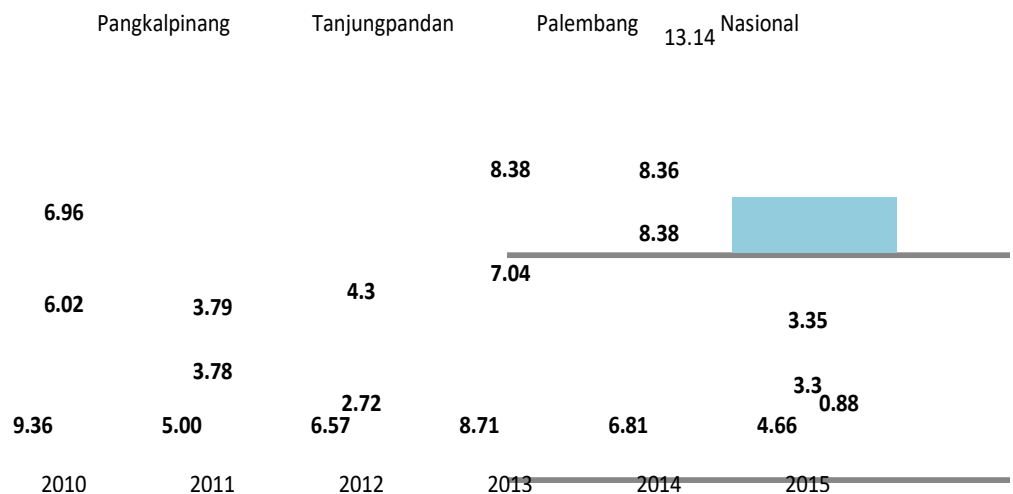
Tabel II.15
Laju Inflasi Tahun 2011-2015
Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66
1. Bahan Makanan	-0,50	8,50	11,08	3,39	6,63
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,32	7,95	6,82	8,63	7,92
3. Perumahan	7,52	5,81	9,20	8,85	3,74
4. Sandang	8,83	5,79	1,63	6,61	2,60
5. Kesehatan	7,09	5,19	5,08	8,13	5,50
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,73	10,31	3,77	6,65	8,62
7. Transportasi dan Komunikasi	10,55	-0,11	11,17	6,98	-2,04

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2011-2015 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah ragamengalami inflasi tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,62persen dan terendah pada kelompok transportasi dan komunikasi dengan rata-rata inflasi sebesar 5,31 persen.

Gambar II.9
Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2011-2015
Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2015

Tahun 2015, inflasi Pangkalpinang relatif tinggi yaitu 4,66 persen bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,35 persen dan Kota Palembang sebagai wilayah yang terdekat sebesar 3,30 persen, sedangkan Kota Tanjungpandan paling rendah dengan inflasi 0.88 persen. Kondisi ini tentunya jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana inflasi Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Palembang sebesar 8,38 persen dan Nasional 8,31 persen. Sedangkan Tanjung Pandan justru memiliki tingkat Inflasi tertinggi 13,41 persen.

c. PDRB Per Kapita

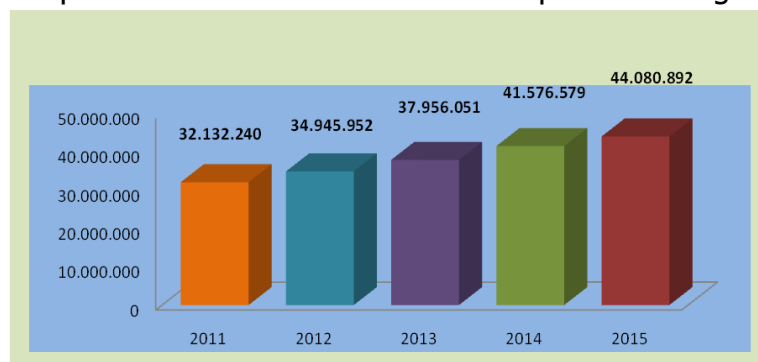
PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32,1 Juta, kemudian naik mencapai Rp. 44,1 juta pada tahun 2015 atau meningkat sebesar Rp. 12,0 juta.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2011-2015, diperlihatkan pada gambar II.10.

Gambar II.10

PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



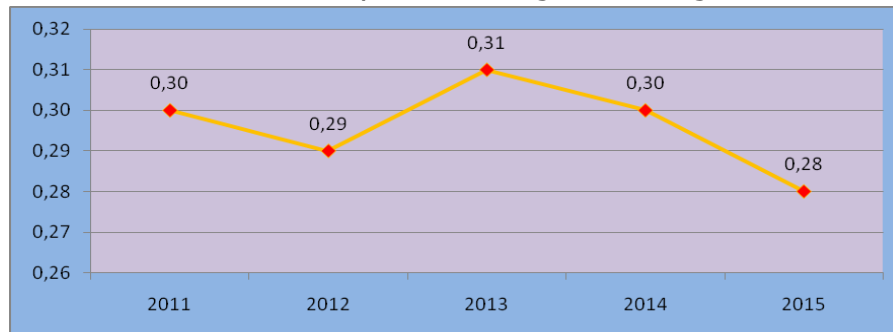
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

d. Indeks Gini

Pada Gambar II.11 di bawah terlihat bahwa Indeks Gini cenderung menurun dari 0,30 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun 2012 dan naik menjadi

sebesar 0,31 pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 angka Indeks Gini cenderung turun dari sebesar 0,30 menjadi sebesar 0,28. Fenomena penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif merata.

Gambar II.11
Indeks Gini Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

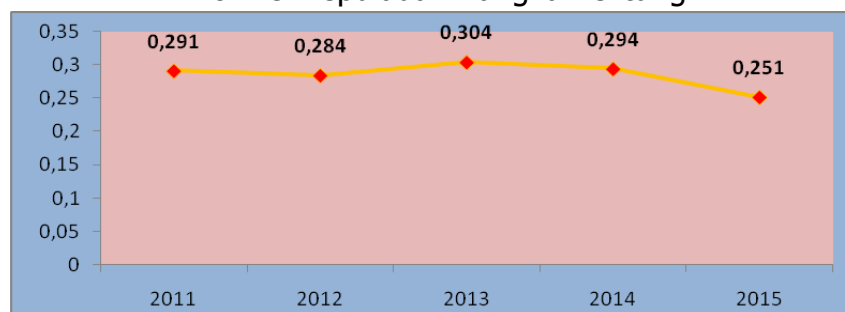


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

e. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun, meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304 dan kembali turun sepanjang tahun 2014 dan 2015, yaitu masing-masing menjadi sebesar 0,294 dan 0,251. Berdasarkan angka indeks ini, mengindikasikan bahwa pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif mendekati merata. Secara lebih rinci kondisi ini diperlihatkan pada Gambar II.12.

Gambar II.12
Indeks Williamson Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1) Angka melek huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usi 15 tahun keatas. Dalam perencanaan pembangunan, angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel II.16 dan Gambar II.13

Tabel II.16

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

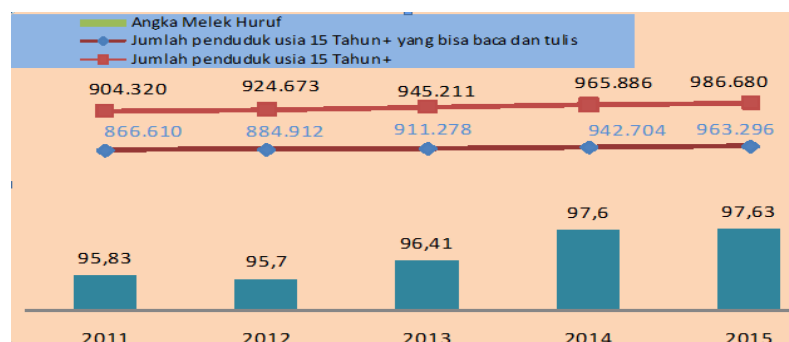
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	866,610	884,912	911,278	942,704	963,296
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	904,320	924,673	945,211	965,886	986,680
3.	Angka melek huruf	95,83	95,70	96,41	97,60	97,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka melek huruf dari Tahun 2012 cenderung menurun dari Tahun 2011 dan kembali meningkat pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015.

Gambar II.13

Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.17 berikut:

Tabel II.17
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.356	97,87
2	Kabupaten Bangka Barat	133,731	138,783	96,36
3	Kabupaten Bangka Selatan	129,505	135,693	95,44
4	Kabupaten Bangka Tengah	124,504	127,331	97,78
5	Kabupaten Belitung	126,995	128,459	98,86
6	Kabupaten Belitung Timur	86,9828	88,066	98,77
7	Kota Pangkalpinang	142,962	144,992	98,60
Jumlah		963,278	986,680	97,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tabel II.18

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

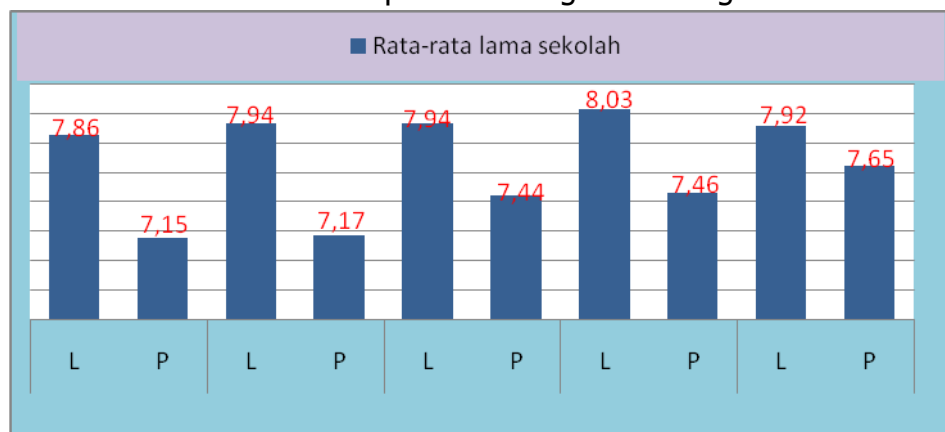
No	Kabupaten/ Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8,29	7,44	8,56	7,51	8,34	7,63	8,28	7,47	8,12	8,03
2	Belitung	7,76	7,04	7,94	7,24	8,40	8,09	8,15	7,82	8,33	8,13
3	Bangka Barat	6,97	6,07	7,17	6,64	7,10	6,48	7,47	6,89	7,69	7,31
4.	Bangka Tengah	7,19	6,51	7,40	6,65	7,48	6,76	7,35	6,61	7,25	6,75
5.	Bangka Selatan	6,17	5,65	6,37	5,54	6,45	6,35	6,56	6,23	5,90	5,65
6.	Belitung Timur	7,90	7,60	7,98	7,50	7,59	7,31	8,20	7,74	7,88	7,78
7.	Pangkalpinang	10,33	9,51	9,91	8,98	9,83	9,19	10,00	9,33	10,26	9,71
Provinsi		7,86	7,15	7,94	7,17	7,94	7,44	8,03	7,46	7,92	7,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga 2014. Namun rata-rata lama sekolah laki-laki tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014 sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan meningkat. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2011 berada di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 10,33 tahun dan yang terendah pada Tahun 2012 di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 5,54 tahun.

Gambar II.14

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Tantangan yang ada yaitu berasal dari tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu 10 tahun atau

setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 (dua) tetapi belum tamat. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 5,65 (lima koma enam lima) tahun atau setingkat dengan SD kelas 6 (enam) tetapi belum tamat. Perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Bahkan pada tahun 2015 menurun dibanding tahun 2011.

Capaian rata-rata lama sekolah laki-laki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi dan di atas rata-rata lama sekolah nasional (7,84) sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah nasional. Rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah rata-rata lama sekolah nasional adalah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah pada tiga daerah tersebut.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2010/2011 sampai dengan Tahun 2014/2015 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.19.

Tabel II.19

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	147,726	155,832	159,972	168,300	168,655
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846
	APK SD/MI	106,14	109,50	109,97	113,22	111,07
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	55.051	54.220	51.888	59.649	64.684
	Jumlah penduduk kelompok	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	usia 13-15 tahun					
	APK SMP/MTs	81,34	78,35	73,35	82,52	87,60
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	41.339	41.133	48.250	54.353	56.185
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531
	APK SMA/MA/SMK	61,34	59,69	68,50	75,51	76,41

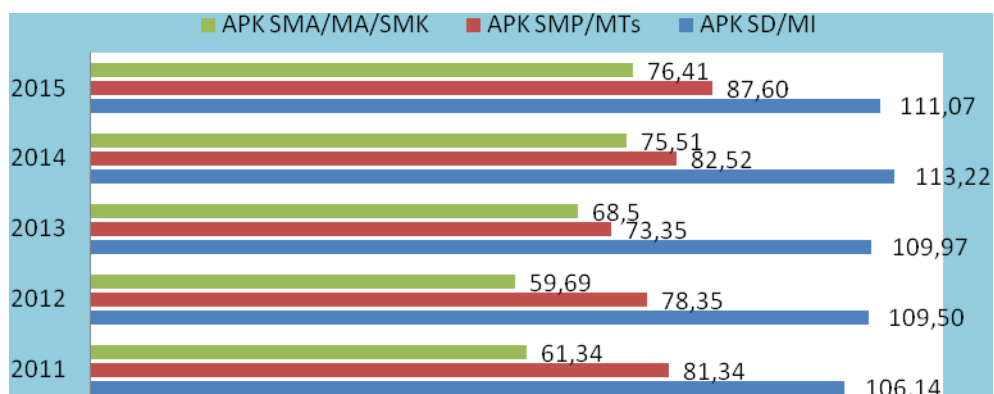
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga Tahun 2014 walaupun pada Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 111,07. Angka ini telah melampaui angka partisipasi kasar nasional (111).

Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs dari Tahun 2011 sebesar 81,34 terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2013. Pada tahun 2012 angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs menurun menjadi 78,35 atau mengalami penurunan sebesar 3,7% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 73,35 atau mengalami penurunan sebesar 9,8% dibandingkan Tahun 2011. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 82,52 demikian juga dengan Tahun 2015 naik menjadi 87,60. Namun angka ini masih berada di bawah angka partisipasi kasar nasional pada tahun 2014 yaitu 101,6.

Gambar II.15

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebesar 61,34, mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 59,69 namun selanjutnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 angka partisipasi kasar tingkat SMA/MA/SMK sebesar 68,50, Tahun 2014 sebesar 75,51 dan Tahun 2015 sebesar 76,41. Namun angka ini masih di bawah angka partisipasi kasar nasional yaitu 79,2.

Tabel II.20
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten / Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
2	Belitung	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65
3	Bangka Barat	25.016	22,444	111,46	9.850	10,325	95,40	6.523	9,965	65,46
4.	Bangka Tengah	23.518	20,603	114,15	9.123	10,126	90,10	8.193	10,254	79,90
5.	Bangka Selatan	24.319	22,914	106,13	9.389	11,010	85,28	5.245	10,745	48,81
6.	Belitung Timur	14.922	12,865	115,99	5.013	6,072	82,56	4.634	5,896	78,59
7.	Pangkalpinang	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
	Jumlah	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi kasar pada tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah di Kabupaten Bangka Selatan 106,13. Walaupun demikian hal ini bukanlah suatu prestasi buruk bahkan telah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah pada tingkat SD/MI.

Angka partisipasi kasar tahun 2014/2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 82,56 dan tingkat SMA/MA/SMK terendah di Kabupaten Bangka Selatan 48,81. APK tingkat SMP/MTs secara keseluruhan masih berada di bawah APK nasional (101,6) sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK secara umum juga masih di bawah nasional (79,2) kecuali Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang APK-nya telah berada di atas APK nasional.

4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tamat sekolah didefinisikan sebagai menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.21

Tabel II.21

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten Bangka	73,5	75,1	74,17	71,59	75,58
	SD	31,37	29,81	29,53	28,77	31,10
	SMP	15,92	16,52	17,48	15,10	19,31
	SMA	21,53	23,19	22,80	22,11	21,07
	Perguruan Tinggi	4,68	5,58	4,36	5,61	4,10
2.	Kabupaten Belitung	70,9	72,05	76,7	75,5	76,51
	SD	31,60	29,29	30,44	30,09	27,40
	SMP	17,31	17,63	17,54	19,77	21,61
	SMA	18,36	20,57	23,44	20,66	20,09
	Perguruan Tinggi	3,63	4,56	5,28	4,98	7,41
3.	Bangka Barat	64,65	66,05	65,21	70,26	70,24
	SD	34,55	31,33	31,00	33,66	31,26
	SMP	13,08	15,73	14,09	14,87	16,41
	SMA	13,96	15,24	16,48	17,22	17,51
	Perguruan Tinggi	3,06	3,75	3,64	4,51	5,06
4.	Bangka Tengah	66,77	66,5	65,59	65,07	68,04
	SD	34,45	31,23	29,94	30,69	33,26
	SMP	14,34	13,53	15,45	14,91	17,17
	SMA	15,27	17,94	16,06	16,33	14,43
	Perguruan Tinggi	2,71	3,80	4,14	3,14	3,18
5.	Bangka Selatan	55,31	56,54	61,59	62,61	56,2
	SD	29,41	30,44	32,95	34,76	30,59
	SMP	12,90	13,44	14,77	14,03	14,16
	SMA	9,95	10,49	10,38	10,61	9,40

No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perguruan Tinggi	3,05	2,17	3,49	3,21	2,05
6.	Belitung Timur	76,06	76,24	74,51	78,4	73,53
	SD	34,39	34,74	36,59	34,31	30,05
	SMP	17,06	17,83	18,18	21,30	20,06
	SMA	19,94	18,83	15,41	18,15	18,97
	Perguruan Tinggi	4,67	4,84	4,33	4,64	4,45
7.	Kota Pangkalpinang	84,55	82,6	81,94	83,21	84,21
	SD	20,13	20,81	21,43	20,35	20,53
	SMP	19,27	15,86	17,69	19,89	19,89
	SMA	32,81	33,50	33,30	32,58	31,16
	Perguruan Tinggi	12,34	12,43	9,52	10,39	12,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka pada tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dari 31,37 menjadi 28,77. Kemudian pada Tahun 2015 meningkat kembali menjadi 31,10. Untuk tingkat SMP mengalami fluktuasi, pada Tahun 2011 APK SMP adalah 15,92 namun meningkat pada Tahun 2015 menjadi 19,31. Perkembangan APK SMA dari Tahun 2011 meningkat pada Tahun 2012 dari 21,53 menjadi 23,19. Namun tahun-tahun berikutnya semakin menurun setiap tahun, APK Tahun 2013 sebesar 22,80, Tahun 2014 sebesar 22,11, dan Tahun 2015 sebesar 21,07. Perkembangan APT untuk tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi sejak Tahun 2011, namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 4,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2011 nilai APT 4,68.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Belitung dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan perkembangan APT ini berkurang dari 31,60 menjadi 27,40. Untuk tingkat SMP APT Tahun 2012 meningkat dari Tahun 2011 yaitu dari 17,31 menjadi 17,63, namun menurun pada Tahun 2013 menjadi 17,54, selanjutnya kembali meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 21,61. Perkembangan APT tingkat SMA meningkat hingga Tahun 2013 yaitu 23,44 dibanding Tahun 2011 nilai APT adalah 18,36. Namun semakin menurun hingga Tahun 2015 APT menjadi 20,09. Perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 mengalami peningkatan walaupun pada Tahun 2014 mengalami penurunan namun pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 7,41.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 31,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,55. Untuk tingkat SMP, APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun

2015 meningkat menjadi 16,41 dari APT Tahun 2011 yaitu 13,08. Perkembangan APT tingkat SMA cukup menggembirakan yaitu senantiasa meningkat dari Tahun 2011 13,96 menjadi 17,51 pada Tahun 2015. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 selalu mengalami peningkatan hingga Tahun 2015 yaitu 3,06 menjadi 5,06.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 33,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,45. Untuk tingkat SMP APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 17,17 dari APT Tahun 2011 yaitu 14,34. Perkembangan APT tingkat SMA dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 15,27 menjadi 14,43. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat dibandingkan APT Tahun 2011 yaitu 3,18 dari 2,71.

Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka Selatan pada tingkat Sekolah Dasar senantiasa meningkat dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 29,41 menjadi 34,76 namun menurun pada Tahun 2015 menjadi 30,59. Untuk tingkat SMP APT meningkat hingga Tahun 2013, menurun pada Tahun 2014, namun jika dibandingkan Tahun 2011 nilai APT meningkat menjadi 14,16 dari 12,90. Demikian juga halnya dengan APT tingkat SMA mengalami fluktuasi namun dibanding Tahun 2011 nilai APT Tahun 2015 menurun dari 9,95 menjadi 9,40. Untuk APT Perguruan Tinggi dari Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 3,05 menjadi 2,05.

Di Kabupaten Belitung Timur APT tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan pada tahun 2015 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 34,39 menjadi 30,05. Untuk tingkat SMP nilai APT mengalami perkembangan yang cukup baik dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 17,06 menjadi 21,30 namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 20,06, walaupun angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2011. Pada tingkat SMA nilai APT mengalami penurunan cukup besar pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 19,94 menjadi 15,41, namun hingga Tahun 2015 APK terus meningkat menjadi 18,97. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 tidak mengalami perkembangan yang berarti. Tahun 2011 nilai APT sebesar 4,67, dan pada Tahun 2015 nilai APT berkurang menjadi 4,45.

Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat Sekolah Dasar di Kota Pangkalpinang hampir tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Pada Tahun 2011 nilai APT sebesar 2013 dan Tahun 2015

sebesar 20,53. Untuk tingkat SMP pada Tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar dibanding Tahun 2011 yaitu dari 19,27 menjadi 15,86. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 19,89. Perkembangan APT untuk tingkat SMA mengalami fluktuasi, namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 32,18 menjadi 31,16. Demikian juga halnya dengan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 12,34 menjadi 12,63. Secara keseluruhan angka pendidikan yang ditamatkan Kota Pangkalpinang paling tinggi sedangkan APT yang paling rendah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

5) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Perkembangan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 s/d 2015 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.22.

Tabel II.22
Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	126.542	133.944	139.243	143.431	146.774
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846
	APM SD/MI	90,92	94,12	95,72	96,49	96,66
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	41.183	43,791	45,153	51.921	53.475
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840
	APM SMP/MTs	60,85	63,28	63,83	71,83	72,42
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	28.251	29.583	35.782	40.979	41.927

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531
	APM SMA/MA/SMK	41,92	42,93	50,80	56,93	57,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada kurun waktu Tahun 2011-2015 angka partisipasi murni pada seluruh tingkat pendidikan meningkat. APM SD/MI pada tahun 2015 sebesar 96,99 telah melampaui APM nasional. Namun APM SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 72,4 masih di bawah nasional berbeda dengan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 55,3 yang telah berada di atas APM nasional.

Angka partisipasi murni untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel II.23 menunjukkan bahwa APM tingkat SD/MI terendah pada Tahun 2015 ada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 95,08, tingkat SMP/MTs terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 66,34 dan terendah tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 37,62.

Tabel II.23
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	33.485	34.382	97,39	12.957	16.803	77,11	10.408	16.503	63,07
2	Belitung	18.277	19.118	95,60	6.917	9.700	71,31	5.385	9.677	55,65
3	Bangka Barat	22.060	22.444	98,29	7.538	10.325	73,01	4.952	9.965	49,69
4	Bangka Tengah	19.589	20.603	95,08	7.194	10.126	71,05	6.260	10.254	61,05
5	Bangka Selatan	21.878	22.914	95,48	8.068	11.010	73,28	4.042	10.745	37,62
6	Belitung Timur	12.816	12.865	99,62	4.390	6.072	72,30	3.723	5.896	63,15
7	Pangkalpinang	18.622	19.520	95,40	6.504	9.804	66,34	7.086	10.491	67,54
Jumlah		146.727	151.846	96,66	53.568	73.840	72,42	41.856	73.531	57,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI pada Tahun 2015 di seluruh kabupaten/kota telah melampaui angka partisipasi murni nasional. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTs seluruh kabupaten/kota APMnya berada di bawah nasional.

Berbeda dengan APM tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang telah melampaui APM nasional, hanya Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan saja yang berada di bawah nasional.

B. Kesehatan

1.) Angka kelangsungan bayi hidup

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.24
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran
Hidup Tahun 2011-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2011		2012		2013		2014	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	9,19	9,19	9,19	9,80	6,96	16,2	5,35	6,73
2	Belitung	15,78	15,78	15,78	16,78	14,75	14,16	12,91	13,81
3	Bangka Tengah	9,96	9,96	9,96	10,23	4,95	4,95	5,74	6,74
4	Bangka Barat	10,50	10,50	10,50	12,00	9,21	8,48	7,61	7,87
5	Bangka Selatan	7,63	7,63	7,63	8,45	8,84	7,74	7,37	8,42
6	Belitung Timur	9,62	9,62	9,62	10,63	14,73	12,84	10,22	11,15
7	Kota Pangkalpinang	6,71	6,71	6,71	7,20	4,73	3,48	2,92	3,16
Prov. Kep. Bangka Belitung		9,67	9,67	9,67	10,45	8,52	7,60	6,92	7,78
Nasional		3,40	4,00	3,40	4,00	3,40	4,00	3,40	4,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel diatas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2011–2014 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan menurun, Untuk Tahun 2014 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,91 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 13,81. Meskipun di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi sebesar 6.92 dan balita sebesar 7.78 pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013 akan tetapi angka tersebut masih tinggi dibanding dengan angka kematian bayi ditingkat nasional yaitu angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar

3,40 dan angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar 4,00 pada tahun 2014.

2.) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 69,88 tahun. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 72,51 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur 71,23 tahun, Kabupaten Bangka 70,48 tahun, dan Kabupaten Belitung 70,32 tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,28 tahun, Kabupaten Bangka Barat 69,47 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 66,86 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.25
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,35	70,40	70,45	70,47	70,48
Belitung	70,10	70,15	70,20	70,22	70,32
Bangka Barat	69,32	69,39	69,44	69,46	69,47
Bangka Tengah	69,83	69,90	69,95	69,98	70,28
Bangka Selatan	66,31	66,41	66,51	66,56	66,86
Belitung Timur	70,94	70,98	71,01	71,03	71,23
Pangkalpinang	72,22	72,26	72,29	72,31	72,51
Prov. Kep. Bangka Belitung	69,31	69,48	69,64	69,72	69,88

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

3.) Persentase balita gizi buruk

Berikut ini pada tabel II.26 menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dimana untuk Tahun 2014 persentase balita dengan Gizi Buruk paling tinggi di Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase sebesar 1,75 sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung dengan 0 %.

Tabel II.26Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0	0,69	0,72	0,78	0,72
2	Belitung	0	2,05	0	0,01	0
3	Bangka Tengah	0,07	2,11	0,05	0,11	0,05
4	Bangka Barat	0,13	2,67	0,20	0,17	0,20
5	Bangka Selatan	0,15	0,46	1,75	0,92	1,75
6	Belitung Timur	0,12	4,12	0,25	0,18	0,25
7	Kota Pangkalpinang	0,05	1,26	0,31	0,19	0,31
Kepulauan Bangka Belitung		0,06	1,66	0,26	0,26	0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

4.) Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2011-2015 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,16 persen pada tahun 2011 menjadi 5,37 persen pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan sepanjang tahun 2013 dan 2014 masing-masing menjadi sebesar 5,25 persen dan 4,97 persen, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,40 persen. Kenaikan ini cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan secara konsisten dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini secara lebih rinci diperlihatkan pada tabel II.27.

Tabel II.27Perkembangan Kemiskinan Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,16	5,37	5,25	4,97	5,40
2.	Jumlah Penduduk Miskin	65.550	70.210	70.900	67.230	74.090
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	243.729	382.412	427.081	469.814	488.701
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,93	0,84	0,65	0,62	0,89

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.28Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,35	3,37	3,47	3,04	2,77
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,91	6,69	6,97	6,84	6,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan Tabel II.28, sepanjang periode tahun 2011-2015 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun. Namun pada tahun 2013 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.29Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Bangka	5.36	5.57	5.40	5,20	5,63
Belitung	6.97	7.26	8.48	7,36	8,38
Bangka Barat	3.59	3.72	3.26	3,15	3,08
Bangka Tengah	5.56	5.77	5.46	3,27	5,67
Bangka Selatan	4.23	4.4	4.01	3,87	3,74
Belitung Timur	7.13	7.43	6.90	6,68	7,33
Kota Pangkalpinang	4.15	4.29	4.15	4,04	4,97
Kepulauan Bangka Belitung	5.16	5.37	5.25	4,97	5,40

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.29, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel II.30 berikut:

Tabel II.30Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2015
Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	894,81	909,04	840,70	837,42	859,41
Sumatera Utara	1491,31	1407,25	1339,16	1.360,60	1.508,14
Sumatera Barat	442,09	404,74	407,47	354,74	349,53
Riau	482,05	483,07	469,28	498,28	562,92
Jambi	272,67	271,67	266,15	281,75	311,56
Sumatera Selatan	1074,81	1057,03	1110,37	1.085,80	1.112,53
Bengkulu	303,60	311,66	327,35	316,50	322,83
Lampung	1298,71	1253,83	1163,06	1.143,93	1.100,68
Kepulauan Bangka Belitung	72,06	71,36	69,22	67,23	66,62
Kepulauan Riau	129,56	131,22	126,67	124,17	114,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel II.30, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain yaitu 5,21 % pada tahun 2013. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel II.31

Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,57	19,46	17,60	16,98	17,11
Sumatera Utara	11,33	10,67	10,06	9,85	10,79
Sumatera Barat	9,04	8,19	8,14	6,90	6,71
Riau	8,47	8,22	7,72	7,99	8,82
Jambi	8,65	8,42	8,07	8,38	9,12
Sumatera Selatan	14,24	13,78	14,24	13,62	13,77
Bengkulu	17,50	17,7	18,34	17,09	17,16
Lampung	16,93	16,18	14,86	14,21	13,53
Kepulauan Bangka Belitung	5,75	5,53	5,21	4,97	4,83
Kepulauan Riau	7,40	7,11	6,46	6,40	5,78

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung hingga tahun 2015 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).

5.) Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima tahun (2011-2015) di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung stabil, tahun 2011 sebesar 0,96 % dengan penduduk yang bekerja sebanyak 589.634 dan tahun 2015 menurun sebesar 0,94 % dengan penduduk yang bekerja sebanyak 623.949 orang. Peningkatan ini masih wajar mengingat angkatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas penduduk Provinsi kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 (lima) tahun juga meningkat.

Tabel II.32
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	893.894	920.065	948.702	973.192	998.120
2.	Angkatan Kerja	611.698	604.163	619.700	636.959	665.842
3.	Penduduk yang Bekerja	589.634	583.102	596.786	604.223	623.949
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.96	0.97	0.96	0.95	0.94

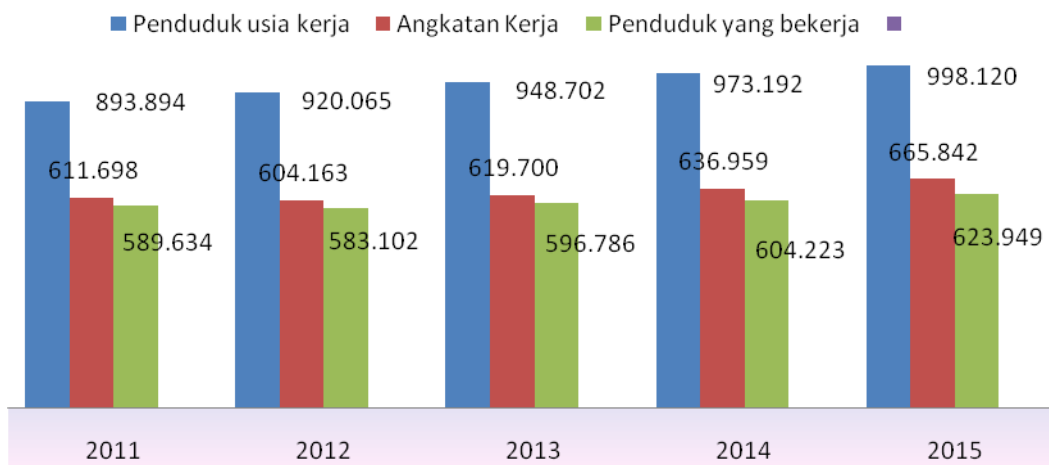
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan grafik gambar II.16 dibawah dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, Angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.33, tren TPAK dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung

fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 68,43 dan tahun 2013 turun menjadi 62,91 sedangkan tahun 2015 naik menjadi 66,71, ini berarti bahwa penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sebesar 66,71 % meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 65,45 %.

Gambar II.16
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.33
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68.43	65.67	62.91	65.45	66.71
2.	Tingkat Pengangguran	3.61	3.49	3.70	5.14	6.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.34 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya kecuali di sektor Primer (Pertanian dan Pertambangan) yang terjadi pergeseran yang cukup besar, dimana untuk sektor pertanian tahun 2011 sebesar 25,93 % meningkat menjadi 36,63 % pada tahun 2015, sedangkan untuk sektor pertambangan pada tahun 2011 sebesar 25,19 % menurun menjadi 12,24 % pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan walaupun pada tiga tahun terakhir harga komoditas pertanian dan perkebunan relatif menurun kecuali lada yang cenderung naik. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang relatif menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah dan kebijakan dari undang-undang minerba yang ketat dan melarang ekspor bahan tambang mentah.

Tabel II.34

Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2011 s.d 2015
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian	25,93	28,60	28,06	31.41	36.63
2. Pertambangan	25,19	22,10	21,28	17.50	12.24
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,46	6,20	6,06	5.88	5.65
4. Listrik, Gas dan Air	0,24	0,30	0,35	0.21	0.46
5. Bangunan	4,55	5,40	4,99	5.16	4.61
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,98	19,90	18,49	20.45	19.68
7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	2,24	2,40	2,90	2.86	2.91
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,90	1,80	1,93	2.19	2.11
9. Jasa Kemasyarakatan	15,51	13,40	15,94	14.35	15.70
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2015

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

A. Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain

adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dsb. Gambaran mengenai perkembangan jumlah grup kesenian adalah sebagaimana tergambar pada Tabel II.35.

Tabel II.35

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,34	1,69	1,65	1,72	1,68
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0079	0,0078	0,007604	0,0074	0,0073

Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000

Sumber: SKPD yang menangani urusan

Berdasarkan data perkembangan Grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2011-2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian dimana tahun 2011 sebesar 1,34 meningkat tahun 2012 menjadi 1,69 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 1,65. Pada tahun 2014 kembali meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,72 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1,68.

Tabel II.36

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
Jumlah		1,894	1

Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000

Sumber: SKPD yang menangani urusan

2.2.3.2. Pemuda dan olahraga

A. Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari SKPD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335 perkumpulan), kemudian bola voli (84 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan).

Tabel II.37

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	2
2.	Kab. Belitung	1	1	1	1	3
3.	Kab. Bangka Barat	-	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1	1
5.	Kab. Bangka Selatan	3	6	6	7	7
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	1	1	2
7.	Kota Pangkal Pinang	1	1	1	2	2
Prov. Kep. Bangka Belitung		9	13	13	15	19

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.38

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	20	20	31	33	34
2.	Kab. Belitung	15	35	62	66	66
3.	Kab. Bangka Barat	30	38	64	64	64
4.	Kab. Bangka Tengah	24	27	30	36	36
5.	Kab. Bangka Selatan	24	51	51	58	133
6.	Kab. Belitung Timur	33	60	65	65	65
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	11	13	25
Prov. Kep. Bangka Belitung		57	242	314	335	423

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.39Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3	3	3	4	9
2.	Kab. Belitung	11	14	15	15	15
3.	Kab. Bangka Barat	17	19	19	19	20
4.	Kab. Bangka Tengah	11	14	15	16	23
5.	Kab. Bangka Selatan	7	10	15	23	159
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	2	4	10
7.	Kota Pangkal Pinang	3	3	3	3	10
Prov. Kep. Bangka Belitung		53	64	71	84	246

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.40Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	8	8	10	25
2.	Kab. Belitung	3	3	3	3	15
3.	Kab. Bangka Barat	5	5	10	14	7
4.	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	2
5.	Kab. Bangka Selatan	2	2	3	3	8
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	10
7.	Kota Pangkal Pinang	8	8	10	10	7
Prov. Kep. Bangka Belitung		26	28	36	42	84

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

Tabel II.41Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	8	10	10	10	15
2.	Kab. Belitung	6	8	10	12	19
3.	Kab. Bangka Barat	2	2	2	4	10
4.	Kab. Bangka Tengah	8	8	10	19	20
5.	Kab. Bangka Selatan	5	5	5	5	59
6.	Kab. Belitung Timur	2	3	3	3	15
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	13	14	20
Prov. Kep. Bangka Belitung		41	47	53	67	158

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

Tabel II.42Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	6	9	9	9
2.	Kab. Belitung	6	6	6	6	6
3.	Kab. Bangka Barat	1	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	4	6	8	10	10
5.	Kab. Bangka Selatan	3	5	5	6	17
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	5
7.	Kota Pangkal Pinang	15	15	15	18	18
Prov. Kep. Bangka Belitung		37	41	46	52	67

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

B. Jumlah Gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelakupembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007–2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.43Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah gedung Olahraga	N/A	10	10	10	10
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	N/A	1.730	1.730	1.730	1.731

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah gedung olahraga sebanyak 10 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2015 sebanyak 1.731 buah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada Tabel II.44.

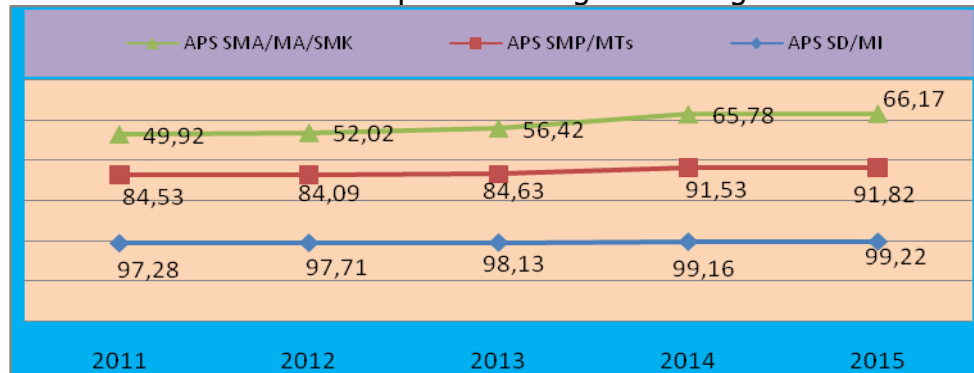
Tabel II.44
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	135.394	139.053	142.749	147.400	150.662
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846
	APS SD/MI (%)	97,28	97,71	98,13	99,16	99,22
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	57.210	58.192	59.867	66.161	67.780
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840
	APS SMP/MTs (%)	84,53	84,09	84,63	91,53	91,82
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	33.642	35.847	39.741	47.349	48.655
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531
	APS SMA/MA/SMK (%)	49,92	52,02	56,42	65,78	66,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 APS tingkat SD/MI sebesar 99,22%, hal ini menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 1.184 anak atau 0,78% yang belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI.

Gambar II.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 84,53% dan menurun pada Tahun 2012 yaitu 84,09% dan terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 91,82%. Demikian juga halnya dengan APS tingkat SMA/MA/SMK dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 mengalami kenaikan namun menurun pada Tahun 2015. Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK Tahun 2015 sebesar 66,17% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 33,83% penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SMA/MA/SMK.

Angka partisipasi sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.45.

Tabel II.45
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015
menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7- 12 tahun	Jumlah pendudu k usia 7- 12 tahun	APS	Jumlah siswa usia 13- 15 tahun	Jumlah pendudu k usia 13-15 tahun	APS	Jumlah siswa usia 16- 18 tahun	Jumlah pendud uk usia 16-18 tahun	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	34.382	34.382	100	15.996	16.803	95,20	11.598	16.503	70,28
2	Belitung	18.705	19.118	97,84	8.889	9.700	91,64	6.296	9.677	65,06

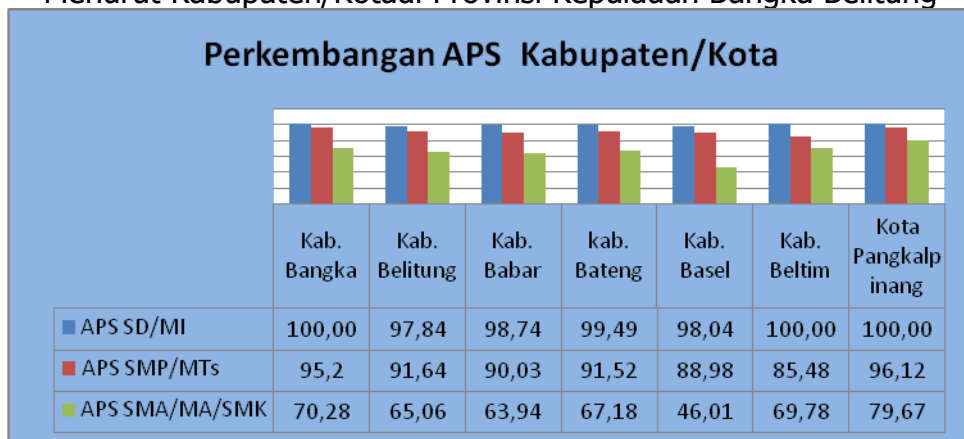
No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APS	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APS	Jumlah siswa usia 16-18 tahun	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Bangka Barat	22.161	22.444	98,74	9.295	10.325	90,03	6.372	9.965	63,94
4.	Bangka Tengah	20.498	20.603	99,49	9.267	10.126	91,52	6.889	10.254	67,18
5.	Bangka Selatan	22.465	22.914	98,04	9.797	11.010	88,98	4.944	10.745	46,01
6.	Belitung Timur	12.865	12.865	100	5.190	6.072	85,48	4.114	5.896	69,78
7.	Pangkalpinang	19.520	19.520	100	9.424	9.804	96,12	8.358	10.491	79,67
Jumlah		150.596	151.846	99,22	67.859	73.840	91,82	48.571	73.531	66,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SD/MI di Kabupaten bangka, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang mencapai 100%, ini menunjukkan seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI. Namun masih ada daerah kabupaten yang belum mencapai 100% APSnya yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan, yang menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun belum mendapatkan layanan sekolah SD/MI.

Gambar II.18

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015), diolah

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur 85,48% dan belum ada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai APS 100%. Ini menunjukkan bahwa pada setiap kabupaten dan kota masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/MA/SMK, APS terendah di Kabupaten Bangka Selatan 46,01%, yang menggambarkan bahwa lebih dari setengah penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK. Begitu juga halnya dengan daerah kabupaten/kota lainnya, masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK.

b. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2011-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel II.46
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	809	817	815	812	830
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139.180	142.312	145.469	148.649	151.846
	Rasio	58,13	57,41	56,03	54,63	54,66
2.	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	219	234	231	232	244
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67.680	69.202	70.740	72.284	73.840
	Rasio	32,36	33,81	32,65	32,10	33,04
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	130	133	157	139	139
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67.393	68.911	70.438	71.981	73.531
	Rasio	19,29	19,30	22,29	19,31	18,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah mencapai 58,13 sekolah per 10.000 penduduk, dan menurun hingga 54,63 sekolah pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah sedikit meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 54,66 sekolah per 10.000 penduduk.

Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan

tersebut berjumlah 73.531 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 139 sekolah atau dengan rasio 18,90.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014/2015 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.47.

Tabel II.47

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7- 12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	187	34.382	54,39	59	16.803	35,11	34	16.503	20,60
2	Belitung	121	19.118	63,29	29	9.700	29,90	17	9.677	17,57
3	Bangka Barat	138	22.444	61,49	43	10.325	41,65	22	9.965	22,08
4.	Bangka Tengah	97	20.603	47,08	26	10.126	25,68	13	10.254	12,68
5.	Bangka Selatan	94	22.914	41,02	36	11.010	32,70	18	10.745	16,75
6.	Belitung Timur	105	12.865	81,62	24	6.072	39,53	13	5.896	22,05
7.	Pangkalpinang	88	19.520	45,08	27	9.804	27,54	18	10.491	17,16
Jumlah		830	151.846	54,66	244	73.840	33,04	139	73.531	18,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 41,02, tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 25,68 dan 12,68.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 81,62, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 41,65 dan 22,08.

c. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.48 berikut.

Tabel II.48

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah guru	9.694	9.875	9.635	9.767	9.303
	Jumlah murid	159.012	161.533	162.152	161.932	165.520
	Rasio	16,40	16,36	16,83	16,58	17,79
2.	SMP/MTs					
	Jumlah guru	3.799	3.934	3.841	4.005	3.784
	Jumlah murid	52.688	58.517	59.863	60.101	65.331
	Rasio	13,87	14,87	15,58	15,01	17,26
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah guru	3.326	3.458	3.788	3.444	3.059
	Jumlah murid	38.435	41.999	44.269	42.930	46.914
	Rasio	11,55	12,14	11,69	12,46	15,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada kurun waktu 2011-2015, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 17,79 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai Tahun 2014 dan kembali menurun pada Tahun 2015 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Rasio guru dan murid pada Tahun 2015 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 20,60, tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 19,46 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yaitu 15,46.

Tabel II.49

Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	2.049	37.580	18,34	919	15.345	16,70	712	10.458	14,69
2	Belitung	1.269	19.334	15,23	441	8.393	19,03	272	6.324	23,25

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
3	Bangka Barat	1.412	24.590	17,41	565	8.665	15,34	403	6.229	15,46
4.	Bangka Tengah	1.167	22.964	19,68	423	8.232	19,46	347	5.009	14,43
5.	Bangka Selatan	1.221	24.042	19,70	541	8.502	15,71	366	5.346	14,61
6.	Belitung Timur	1.032	13.253	12,84	353	5.806	16,45	300	3.816	12,72
7.	Pangkalpinang	1.153	23.757	20,60	542	10.388	19,17	659	9.732	14,77
Jumlah		9.303	165.520	17,79	3.784	65.331	17,26	3.059	46.914	15,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

a. Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2010-2015, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.50.

Tabel II.50
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Bangka	1	1	1	2	2	2
Belitung	1	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1	1
Provinsi Kep. Babel	7	7	7	8	8	8

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

b. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.51

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		8	8	8	8
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah		1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah		-	-	-	-
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit		9	9	9	9
6.	Jumlah Penduduk		1.289.321	1.339.773	1.360.152	135.316
7.	Rasio		0,01	0,01	0,01	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.52

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	2	0,01	1	0,00	-	-	-	-	2	0,01	5	0,02
2	Kab. Bangka Barat	1	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,01
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4.	Kab. Bangka Selatan	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
5.	Kab. Belitung	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01	2	0,01
6.	Kab. Belitung Timur	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
7.	Kota Pangkalpinang	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	Jumlah	8	0,04	35	0,00	-	-	-	-	7	0,03	16	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel diatas, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2013 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar, seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 76,4 persen, diikuti Kabupaten Bangka Barat 87,4 persen, Kabupaten Bangka 87,7 persen, Kota Pangkalpinang 100 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Bangka Tengah menjadi 48,2 persen dan Kabupaten Belitung menjadi 75,6 persen.

Tabel II.53

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	30,55	83,3	81,39	87,7	87,7
2	Belitung	48,15	15,5	78,44	75,6	75,6
3	Bangka Tengah	62,21	60,8	78,87	48,2	48,2
4	Bangka Barat	70,86	78,5	54,66	87,4	87,4
5	Bangka Selatan	13,41	62,7	73,80	76,4	76,4
6	Belitung Timur	25,49	48,6	72,39	100	100
7	Kota Pangkalpinang	13,29	50,6	91,84	92,0	92,0
Kepulauan Bangka Belitung		36,69	60,00	76,38	80,2	80,2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.54

Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	1,71	1,77	1,67	0,97	0,48
2	Belitung	2,72	2,61	1,97	0,66	1,31
3	Bangka Tengah	5,91	8,27	4,28	2,13	2,28
4	Bangka Barat	14,10	8,62	4,52	4,23	0,98
5	Bangka Selatan	4,93	5,64	2,08	0,66	1,63
6	Belitung Timur	5,03	0,95	1,58	0,57	0,98
7	Kota Pangkalpinang	1,48	1,02	0,67	0,39	0,31
Kepulauan Bangka Belitung		4,82	4,10	2,36	1,39	0,68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 & Data Sektoral 2015

Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010–2014. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan

gejala penyakit berat karenamenurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasiberisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah denganepidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan dalam tabel II.55 berikut:

Tabel II.55
Perkembangan Prevelensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	0	8,33	3,94	3,94	0
2	Belitung	0,56	2,70	1,80	0	0
3	Bangka Tengah	8,11	2,50	0,01	0	0
4	Bangka Barat	4,94	0	0	0	0
5	Bangka Selatan	0	3,17	9,84	1,08	0
6	Belitung Timur	3,85	0,20	0,02	2,17	0
7	Kota Pangkalpinang	1,96	6,98	10,33	6,67	0
Kepulauan Bangka Belitung		8,11	8,33	10,33	13,86	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwa peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlupakan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

Tabel II.56
Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	8,08	5,60	25,92	43,15	30,90
2	Belitung	56,94	19,88	214,38	111,81	13,93
3	Bangka Tengah	38,22	3,33	111,48	87,21	25,26

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
4	Bangka Barat	40,12	49,10	98,85	66,72	6,98
5	Bangka Selatan	4,15	46,95	75,93	26,47	20,55
6	Belitung Timur	21,16	22,66	13,24	7,72	6,80
7	Kota Pangkalpinang	49,89	29,17	88,48	27,68	8,88
Kepulauan Bangka Belitung		29,37	27,93	86,17	53,4	23,82

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2010-2014

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2010-2014 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2014, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.57
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	11	11	12	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	7	7	7	8	8
4	Bangka Barat	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	8	9	9	9	9
6	Belitung Timur	6	6	6	6	7
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9
Kepulauan Bangka Belitung		58	59	60	61	62

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015



Tabel II.58
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	35	11	36	11	37	12	36	12	33
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	31	9	33
3	Bangka Tengah	7	17	7	18	7	21	7	18	8	19
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	19	8	18
5	Bangka Selatan	8	28	9	29	8	28	9	29	9	29
6	Belitung Timur	6	18	6	18	6	17	6	18	6	18
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	19	9	7	9	19	9	19
Prov. Kep. Bangka Belitung		58	167	59	169	58	160	60	169	61	169

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015



Tabel II.59
Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(5)	(6)	(15)	(16)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Prov. Kep. Babel	3	2	0	1	2	0	6	1	0	10	0	1	10	0	1	10	0	1
Bangka	48	13	11	22	11	17	60	13	17	60	11	22	61	9	16	61	9	16
Belitung	34	8	10	4	8	3	40	10	2	41	10	4	40	10	6	40	10	6
Bangka Tengah	35	8	7	4	5	0	39	7	2	42	7	4	44	7	5	44	7	5
Bangka Barat	29	4	5	4	6	2	38	5	2	54	5	4	36	7	3	36	7	3
Bangka Selatan	20	3	6	0	4	0	27	5	0	27	6	0	23	7	3	23	7	3
Belitung Timur	24	3	1	14	1	0	34	5	0	34	8	2	32	10	4	32	10	4
Pangkalpinang	63	15	46	59	17	30	61	17	41	61	21	51	56	19	42	56	19	42
Jumlah	256	54	72	261	54	52	305	63	64	329	68	88	292	69	83	292	69	83

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

Keterangan :

U : Dokter Umum

G : Dokter gigi

Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.59 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

c. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya; Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884 Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000 Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188 Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750 Ha Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria

agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*).

Tabel II.60

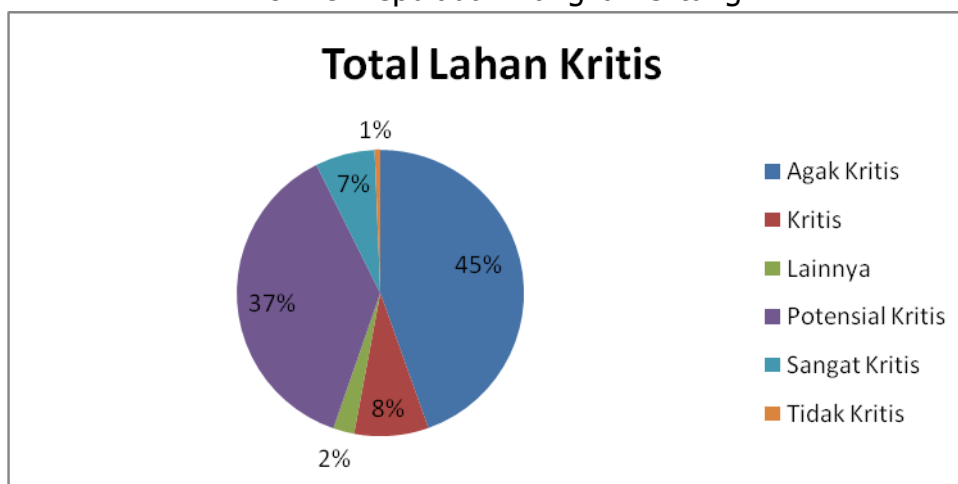
Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kelas Kritis	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Agak Kritis	746.232,74
2	Kritis	140.887,05
3	Lainnya	39.895,54
4	Potensial Kritis	624.532,21
5	Sangat Kritis	112.878,54
6	Tidak Kritis	10.814,44
Jumlah		1.675.240,51

Sumber: inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan Prov. Kep. Bangka Belitung(BLHD), 2014

Gambar II.19

Presentase Lahan Kritis Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan (BLHD), 2014

Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja.

Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang di dalam tabel II.61 berikut.

Tabel II.61

Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57
Ketaatan terhadap RTRW	87.50	95.00	100.00	100.00
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	n.a	3.50	6.89	17.20
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015)

Berdasarkan table II.61 diatas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja urusan penataan ruang cenderung meningkat dan berada diatas target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

b. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantab.

Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.62 berikut:

Tabel II.62

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jenis Permukaan				
	Diaspal	600,4	896,33	1.496,73
	Kerikil	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	3,00	3,00
2. Kondisi Jalan				
	Baik	539,17	387,33	926,50
	Sedang	52,72	441,89	494,61
	Rusak	7,20	58,60	65,80
	Rusak Berat	1,30	11,51	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan data diatas, terdapat 58,60 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 441,89 km kondisi jalan dalam keadaan sedang. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.63

Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

Jenis Kontruksi	Negara	Provinsi	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(5)	
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu	0,00	81,30	81,30	
2. Beton Bertulang	1 804,03	2 876,90	4 680,93	
3. Rangka baja	992,15	474,00	1 466,15	
Jumlah/Total				
	2015	2 796,18	3 432,20	6 228,38
	2014	2 273,98	3 969,85	6 243,83
	2013	2 228,00	3 444,80	5 672,80
	2012	2 173,00	2 123,40	4 296,00
	2011	2 262,00	1 522,90	3 784,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

2.3.1.4. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah menghuni rumah tinggal sesuai dengan kriteria yang layak, yaitu diatas 7m persegi perkapita. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada Tabel II.64.

Tabel II.64

Persentase Rumah Tangga dengan Luas Hunian per Kapita \leq 7,2 m² Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2015

Kabupaten / Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangka	2,98	4,08	3,50	2,16
Belitung	8,08	9,05	7,02	5,84
Bangka Barat	7,35	5,85	4,59	6,82
Bangka Tengah	6,76	4,75	2,82	5,11
Bangka Selatan	7,82	6,53	6,13	5,15
Belitung Timur	8,79	7,37	7,64	7,17
Kota Pangkalpinang	6,24	6,16	5,78	7,75
Kepulauan Bangka Belitung	6,41	6,00	5,08	5,34

Sumber : SUSENAS, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejak tahun 2012, kecenderungan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni cenderung menurun, namun demikian pada tahun 2014 terdapat peningkatan, meskipun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel II.65

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	N/A	N/A	1.053	1.097	1.229
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	N/A	N/A	8,01	8,16	8,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dari tabel Rasio Jumlah polisi Pamong Praja di atas, menunjukkan bahwa rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk relatif meningkat dimana tahun 2013 sebesar 8,01 meningkat menjadi 8,16 tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 8,95. Walaupun kenaikan ini relatif kecil namun dapat dijadikan patokan bahwa

Pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.66

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Siskamling	N/A	N/A	609	721	988
2.	Jumlah Desa	312	312	309	309	309
3.	Rasio Jumlah siskamling	N/A	N/A	1,97	2,33	3,20

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Dari tabel Rasio Pos Siskamling di atas, menunjukkan peningkatan rasio jumlah Pos Siskamling di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana tahun 2013 sebesar 1,97 meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,33 dan tahun 2015 sebesar 3,20.

2.3.1.6. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.67 dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang dan tahun 2015 sebesar 52.346 orang.

Tabel II.67

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	38.710	29.177	38.506	43.968	52.346

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.3.1.7. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.68, tren TPAK dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 68,43 dan tahun 2013 turun menjadi 62,91 sedangkan tahun 2015 naik menjadi 66,71, ini berarti bahwa penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sebesar 66,71 % meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 65,45 %.

Tabel II.68

Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68.43	65.67	62.91	65.45	66.71
2.	Tingkat Pengangguran	3.61	3.49	3.70	5.14	6.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Salah satu indikator dari kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dari penduduk yang bekerja adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan dimana kualitas penduduk bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Perbaikan kualitas penduduk bekerja diarahkan untuk menurunkan penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) tinggi (Diploma dan Universitas).

Tabel II.69

Perkembangan Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

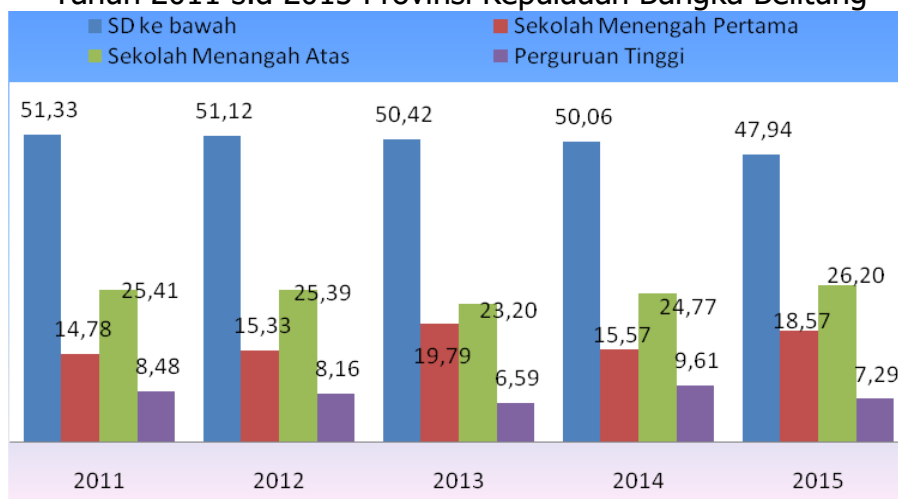
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD ke bawah	51.33	51.12	50.42	50.06	47.94
2.	Sekolah menengah Pertama	14.78	15.33	19.79	15.57	18.57
3.	Sekolah menengah atas	25.41	25.39	23.20	24.77	26.20
4.	Perguruan Tinggi	8.48	8.16	6.59	9.61	7.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan grafik gambar II.20, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja masih didominasi oleh kategori pendidikan SD ke bawah walaupun dengan tren yang menurun, dimana tahun 2011 sebesar 51,33 % dan tahun 2015 sebesar 47,94 %. Sedangkan untuk kategori pendidikan menengah pertama, Sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi menunjukkan tren yang berfluktuatif namun untuk dua tahun terakhir (2014 dan 2015) menunjukkan tren peningkatan, dimana untuk sekolah menengah atas tahun 2014 sebesar 24,77% sedangkan tahun 2015 sebesar 26,20 %, untuk kategori penduduk yang bekerja dengan tingkat Perguruan Tinggi menunjukkan tren penurunan untuk dua tahun terakhir, dimana tahun 2014 sebesar 9,61 % sedangkan tahun 2015 sebesar 7,29 %. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah dimana masih didominasi oleh tingkat lulusan Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama sebesar 65,51 % sedangkan tingkat lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebesar 34,49 %.

Gambar II.20

Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.70, secara kewilayahan untuk penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, relatif meningkat hanya untuk Kabupaten Belitung yang mengalami penurunan dimana tahun 2014 sebesar 136.813 orang dan tahun 2015 turun menjadi 129.985 orang. Namun secara kumulatif untuk provinsi kepulauan Bangka Belitung Penduduk usia kerja selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat.

Tabel II.70

Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	201.933	208.239	214.926	220.272	225.989
2.	Kab. Belitung	115.053	119.211	123.535	136.813	129.985
3.	Kab. Bangka Barat	125.921	129.846	133.298	133.833	140.408
4.	Kab. Bangka Tengah	117.671	120.188	122.345	125.701	128.764
5.	Kab. Bangka Selatan	124.523	128.040	130.355	126.662	137.251
6.	Kab. Belitung Timur	79.149	81.813	84.767	86.961	89.134
7.	Kota Pangkal Pinang	129.644	132.728	139.476	142.950	146.589
Prov. Kep. Bangka Belitung		893.894	920.065	948.702	973.192	998.120

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015), BBDA (2012-2016)

Berdasarkan Tabel II.71, secara kewilayahan untuk Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten Kota. Untuk tahun 2015 TPAK tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70,32 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 63,88 % sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TPAK tahun 2015 sebesar 66,71 %.

Tabel II.71

Data TPAK Tahun 2011 s.d 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	68,25	64,24	64,40	65,45	63,88
2.	Kab. Belitung	68,01	67,83	67,81	63,48	67,64
3.	Kab. Bangka Barat	69,27	65,42	69,17	67,12	65,47
4.	Kab. Bangka Tengah	68,94	64,00	62,13	62,48	66,48
5.	Kab. Bangka Selatan	70,38	65,00	64,53	67,08	70,32
6.	Kab. Belitung Timur	67,97	67,00	64,85	68,79	68,11
7.	Kota Pangkal Pinang	66,22	67,51	64,68	64,90	67,41
Prov. Kep. Bangka Belitung		68.43	65.67	65.32	65.45	66,71

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terkahir relatif meningkat dan untuk tahun 2015 penduduk yang bekerja sebanyak 623.949 orang.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari Pemerintah Daerah. Dari Tabel II.72, Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Untuk Tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yang memiliki TPT yang tinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 8,87%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6,58 % dan Kota Pangkalpinang sebesar 10,64 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6.29 % dan secara Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari rata-rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 6,18 %.

Tabel II.72

Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3,15	2,77	4,26	8,36	8,87
2.	Kab. Belitung	2,97	1,76	2,59	3,03	4,57
3.	Kab. Bangka Barat	3,64	3,79	3,91	1,21	5,92
4.	Kab. Bangka Tengah	3,21	4,54	3,47	5,64	6,58
5.	Kab. Bangka Selatan	3,92	3,83	1,64	3,26	2,01
6.	Kab. Belitung Timur	2,51	2,42	2,20	2,61	2,55
7.	Kota Pangkal Pinang	5,63	5,52	6,66	8,84	10,64
Prov. Kep. Bangka Belitung		3,61	3,49	3,70	5,14	6,29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.73, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 Orang sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah

pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.73
Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3.341	3.710	5.900	12.053	12.805
2.	Kab. Belitung	2.327	1.425	2.169	2.635	4.015
3.	Kab. Bangka Barat	3.177	3.217	3.605	1.083	5.443
4.	Kab. Bangka Tengah	2.604	3.489	2.639	4.430	5.631
5.	Kab. Bangka Selatan	3.432	3.187	1.377	2.769	1.936
6.	Kab. Belitung Timur	1.348	1.329	1.211	1.562	1.550
7.	Kota Pangkal Pinang	4.835	4.704	6.013	8.204	10.513
Prov. Kep. Bangka Belitung		22.064	21.061	22.914	32.736	41.893

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.3.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.74 dan Tabel II.75.

Tabel II.74
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	57.39	52,85	58,07	59,40	62,01
2.	Belitung	49.27	49,21	49,37	48,56	40,16
3.	Bangka Barat	53.32	56,29	58,28	54,81	55,57
4.	Bangka Tengah	52.92	44,54	45,08	54,93	54,29
5.	Bangka Selatan	39.16	43,77	45,79	37,80	37,13
6.	Belitung Timur	42.25	47,21	49,65	50,11	63,33
7.	Kota Pangkal Pinang	49.60	50,01	55,20	56,10	55,44
Prov. Kep. Bangka Belitung		55.62	56,03	56,54	57,29	56,12

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Tabel II.75Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	85,32	85,86	86,03	86,77	86,92
2.	Belitung	85,48	85,59	85,73	86,61	87,19
3.	Bangka Barat	87,04	87,28	87,86	88,11	88,56
4.	Bangka Tengah	88,50	89,26	90,06	90,28	90,60
5.	Bangka Selatan	78,24	79,75	81,24	82,17	82,52
6.	Belitung Timur	83,81	83,95	84,17	84,29	85,37
7.	Kota Pangkal Pinang	91,92	82,05	92,08	92,30	92,47
Prov. Kep. Bangka Belitung		86,87	87,10	87,54	87,73	87,74

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IPD masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 30, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

B. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.76Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2014 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.77 dan Gambar II.21 berikut:

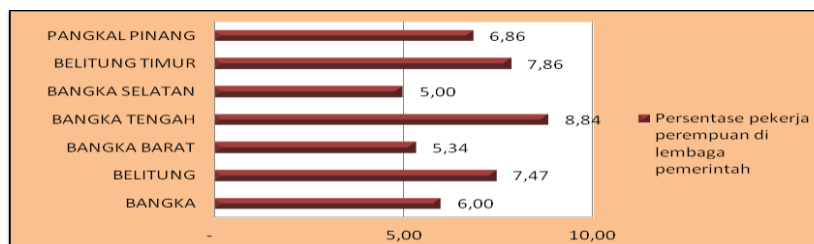
Tabel II.77Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
Jumlah		13.411	204.416	6,56

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar II.21

Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar II.21 Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana berikut:

Tabel II.78

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	N/A	135	115	84	88
2.	Jumlah Rumah Tangga	N/A	352.668	371.242	368.504	345.928
3.	Rasio KDRT		0,038	0,031	0,023	0,025

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015

Berdasarkan Tabel II.78 jumlah KDRT Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135 ditahun 2012 menjadi 88 di tahun 2015.

2.3.1.9. Urusan Pangan

Tabel II.79

Data Ketergantungan Beras 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.261.737	1.298.168	1.315.123	1.341.425	1.364.009
2	Kebutuhan Beras/ Tahun	138.160,20	142.149,40	144.005,97	146.886,09	149.359,00
3	Produksi Bersih Beras (ton)	9.542,75	14.414,52	16.663,81	16.863,55	17.553,40
4	Kondisi ketersediaan (%)	6,91	10,14	11,57	11,48	11,75
5	Ketergantungan (%0	93,09	89,86	88,43	88,52	88,25

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan umum terkait ketahanan pangan adalah masih rendahnya produksi pangan (utamanya beras) yang mampu dihasilkan oleh petani lokal serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Sedangkan kebutuhan beras setiap tahunnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tabel II.79 menunjukkan meskipun terjadi penurunan tingkat ketergantungan dari angka 93,09 % pada tahun 2011 menjadi 88,25% pada tahun 2015 namun angka ini masih cukup tinggi.

Tabel II.80

Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2012-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/ Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten Bangka	2.528	3.728	4.681	9.303
2	Kabupaten Bangka Tengah	504	588	470	365
3	Kabupaten Bangka Barat	3.184	4.846	6.296	3.753
4	Kabupaten Bangka Selatan	13.119	16.046	7.803	8.002
5	Kabupaten Belitung	1.400	1.785	1.614	1.477
6	Kabupaten Belitung Timur	2.240	1.487	2.617	4.170
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.80 menunjukkan produksi padi pada tiap kabupaten setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan produksi yang berfluktuatif yang dipengaruhi beberapa kendala antara lain faktor cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

Tabel II.81

Data Ketersediaan Pangan 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Ketersediaan Energi	Kkal/ kap/Hari	2.768,82	2.437,20	2,490,00
2	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	65,07	79,38	71,56
3	Ketersediaan lemak	Gram/Kap/Hari	120.53	144,63	76,55
4	PPH ketersefiaan		57.24	78,50	78,78

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel II.81 diatas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2016 ketersediaan energi ideal maupun protein ideal telah terpenuhi. Adapun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/Kap/Hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 Gram/Kap/Hari.

2.3.1.10. Urusan Pertanahan

A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.82Luas Lahan (m²) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/ Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	8.380	-	293.511	-	-	49.684	-	1.101.464	-	-	604.086	-	2.648.055	-	-
2	Bangka Tengah	39.464	-	1.144.196	-	-	22.440	-	1.445.234	-	-	74.197	-	2.004.134	-	-
3	Bangka Barat	-	-	27.672.000	-	-	-	-	4.290.460	-	-	25.855	-	1.694.620	-	-
4	Bangka Selatan	68.096	139.457.500	44.842.708	61.937	-	70.014	139.457.500	48.664.372	276.502	-	101.951	139.457.500	52.813.040	602.411	-
5	Pangkalpinang	264.335	-	357.960	-	-	422.363	-	657.138	-	-	732.862	-	149.645	-	-
6	Belitung	143.353	-	5.260.054	-	-	197.045	-	5.725.718	-	-	1.071.801	55.855.200	2.968.993	-	-
7	Belitung Timur	49.495	14.764.520	378.629	-	-	75.676	-	1.857.907	-	-	5.064	55.855.200	743.650	-	-
	Jumlah	573.123	154.222.020	79.949.058	61.937	-	837.222	139.457.500	63.742.293	276.502	-	2.615.816	251.167.900	63.022.137	602.411	-
	Total Luas Wilayah	756.527.919														

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.83

Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinang	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
	Jumlah	2.146.277	139.457.500	81.912.992	977.115	194.723	3.910.875	140.243.391	69.636.110	1.496.977	-	10.842	3.525.160	153.400.366	75.759.684	1.768.093	550.000	10.842

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

Tabel II.84

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	2,94	-	102,91	-	-	17,04	-	377,75	-	-	202,70	-	888,57	-	-
2	Bangka Tengah	23,80	-	690,07	-	-	13,23	-	852,30	-	-	42,80	-	1.156,15	-	-
3	Bangka Barat	-	-	15.363,09	-	-	-	-	2.328,89	-	-	13,73	-	900,10	-	-
4	Bangka Selatan	38,27	78.369,36	25.199,75	34,81	-	38,16	76.004,44	26.522,12	150,69	-	54,96	75.173,57	28.468,49	324,73	-



No.	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
5	Pangkalpinang	147,11	-	190,50	-	-	229,80	-	342,27	-	-	390,01	-	76,27	-	-
6	Belitung	88,00	-	3.240,00	-	-	118,00	-	3.415,00	-	-	622,00	32.423,00	1.723,00	-	-
7	Belitung Timur	45,18	13.477,67	345,63	-	-	67,59	-	1.659,39	-	-	4,52	49.887,19	664,19	-	-
	Jumlah	345,30	91.847,03	45.131,95	34,81	-	483,83	76.004,44	35.497,72	150,69	-	1.330,73	157.483,76	33.876,77	324,73	-
	Total Luas Wilayah	791.385,01														

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.85

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
	Jumlah	1.132,21	73.595,46	44.312,00	515,65	109,88	2.284,45	72.631,83	36.666,99	773,30	-	5,60	1.756,35	75.229,09	39.360,49	494,48	-	5,48
	Total Luas Wilayah	791.385,01																

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

B. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel II.86

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten / Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah Kasus Terdaftar	20			18			39		
	Jumlah Kasus Diselesaikan		5			1			15	
	Penyelesaian Kasus (%)			25			5,5			38,4

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2.3.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada table II.87.

Tabel II.87

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKLH	61.19	58.17	59.29	60.21	60.56

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, 2015

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.88

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	62,99	68,01	30,55	83,3	81,39	87,7	73.82
2	Belitung	52,33	11,84	48,15	15,5	78,44	75,6	73.73
3	Bangka Tengah	80,70	17,74	62,21	60,8	78,87	48,2	38.68
4	Bangka Barat	69,77	85,24	70,86	78,5	54,66	87,4	77.58
5	Bangka Selatan	96,76	11,94	13,41	62,7	73,80	76,4	75.18
6	Belitung Timur	42,72	2,42	25,49	48,6	72,39	100	73.82
7	Kota Pangkalpinang	11,42	5,37	13,29	50,6	91,84	92,0	86.72
Kepulauan Bangka Belitung		58,28	28,29	36,69	60,00	76,38	80,2	71.24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.88, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen.

2.3.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Tabel II.89

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	41	58	60	-

B. Kepemilikan KTP

Tabel II.90

Kepemilikan KTP

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan KTP	-	551.011	740.365	765.507	-

C. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Tabel II.91

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	287	328	407	-

D. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel II.92

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	551.011	740.365	765.507	-

2.3.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2012 jumlah binaan LPM sebanyak 1.096 meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.575 dan tahun 2015 sebesar 3.062. Sedangkan kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2015 yaitu sebanyak 581 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling rendah yaitu sebanyak 483 LPM.

Tabel II.93
Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2012 s.d 2015
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	111	292	158	385	482	1.231	501	1.499
2	Belitung	285	451	262	310	330	709	492	767
3	Bangka Barat	269	685	374	887	462	1.370	503	1.480
4.	Bangka Tengah	194	481	266	721	281	776	502	1.202
5.	Bangka Selatan	113	232	291	757	439	1.078	483	1.481
6.	Belitung Timur	125	297	224	534	552	960	581	1.058
Jumlah		1.096	2.438	1.575	3.594	2.546	6.124	3.062	7.487

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2012 jumlah kelompok PKK sebanyak 2.438 meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 3.594 dan tahun 2015 sebesar 7.487. Sedangkan kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.499 kelompok PKK dan kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 767 kelompok PKK.

2.3.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relative lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagaimana disajikan pada table II.94.

Tabel II.94

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,28	2,25	2,22	2,19	2,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2011 terjadi trend penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.95
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah akseptor KB	58.902	52.762	40.976	37.576	176.549
2.	Jumlah pasangan usia subur	232.292	256.116	272.808	252.481	279.880
3.	Rasio akseptor KB	25,36	20,60	15,02	14,88	63,08

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan pada tabel II.95 pada kurun waktu 2011 - 2015 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami trend penurunan, namun di tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 14,88 ditahun 2014 menjadi 63,08 pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut :

Perkembangan Rasio Akseptor KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci menurut kabupaten/ Kota disajikan dalam Tabel II.96.

Tabel II.96
Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten / Kota
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	0,72	0,78	0,79	0,80	0,77
2.	Kab. Belitung	0,84	0,85	0,88	0,90	0,90
3.	Kab. Bangka Barat	0,29	0,69	0,70	0,78	0,82
4.	Kab. Bangka Tengah	0,88	0,80	0,83	0,71	0,78
5.	Kab. Bangka Selatan	0,86	0,83	0,84	0,83	0,86
6.	Kab. Belitung Timur	0,91	0,93	0,85	0,85	0,84
7.	Kota Pangkal Pinang	0,84	0,83	0,79	0,79	0,76
	Prov. Kep. Bangka Belitung	0,72	0,78	0,79	0,80	0,77

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan data tahun 2011- 2015 yang ada, Kota Pangkal Pinang mengalami tren penurunan rasio akseptor KB, untuk Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat terjadi peningkatan Tren sedangkan Kabupaten yang lain (Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur) mengalami Tren Fluktuatif.

C. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.97 dan Gambar II.22 sebagai berikut:

Tabel II.97

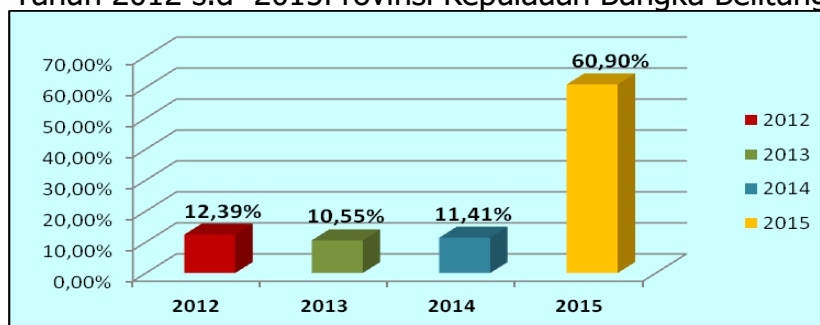
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Gambar II.22

Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan gambar II.22 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang drastis, hal ini di pengaruhi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I seperti yang dapat di lihat pada tabel 2.3.

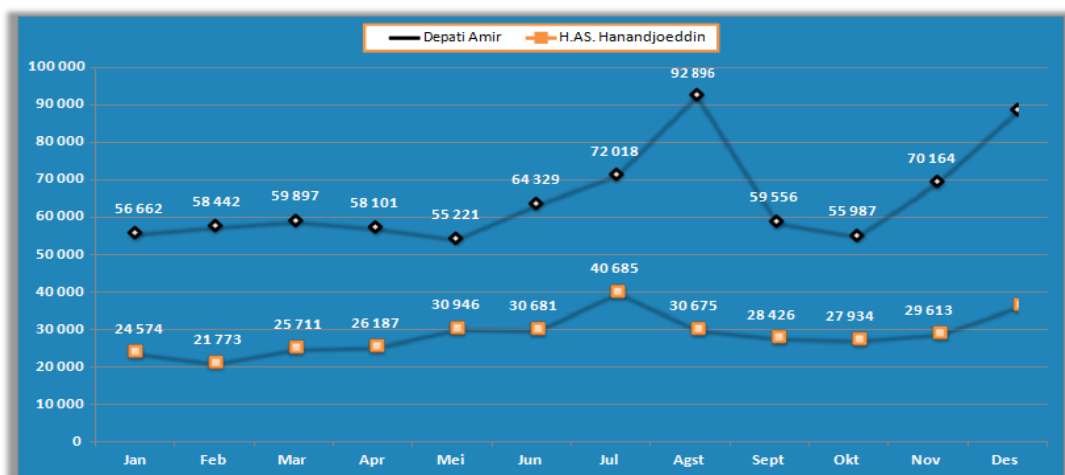
2.3.1.15. Urusan Perhubungan

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.23.

Gambar II.23

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada Tabel II.98 berikut:

Tabel II.98
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	-	lo-
b. Nonreguler	4	3.261
2. Pelayaran Dalam Negeri	102	159.704
3. Pelayaran Rakyat	2.503	2.909.102
4. Pelayaran Perintis	313	62.118
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 masih didominasi oleh pelayaran rakyat yaitu sebanyak 2.503 unit dengan berat total 2.909.102 Grosston. Disisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2011 – 2015 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada table II.99.

Tabel II.99
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	2 615	39 543	4 275	17 701	8 499	325 432
2014	2 610	35 599	4 295	17 096	8 237	328 114
2013	2 648	31 137	4 325	16 640	8 124	333 802
2012	2 672	26 006	4 036	15 604	7 585	325 196
2011	2 273	19 859	3 424	11 897	6061	279 735

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan table tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis pickup dan bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013 – 2015.

2.3.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan e-Gov yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan eGov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional.

2.3.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah : masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

Tabel II.100

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	N/A	738	782	798	812
2.	Jumlah Koperasi	N/A	950	998	1.076	1.103
3.	Persentase Koperasi Aktif		77.70	78.35	74.16	73.61

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan, dari data di atas tahun 2013 sebesar 78,35 % menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,16 % dan menjadi 73,61 % pada tahun 2015.

Tabel II.101
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2012 UKM sebanyak 284.859 meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 291.322 dan 292.456 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 293.985.

2.3.1.18. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: "Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional". Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, Terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, Tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Tabel II.102
Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Investor	34	43	41	100	74
2	Nilai Investasi (Trillin Rp)	1.066	1.707	1.739	2.056	1.156

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

2.3.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olah raga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itumerupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradasi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Tabel II.103

Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	15	15	14	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dari data Tabel di atas, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2012 s.d 2015) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda.

Tabel II.104

Jumlah Klub/Organisasi Olah raga Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Klub/Organisasi Olahraga	595	595	595	595	595

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil tanpa perubahan yaitu sebanyak 596 klub/organisasi.

2.3.1.20. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta up-dating data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Tabel II.105

Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.3.1.21. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

2.3.1.22. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu perpustakaan milik Pemerintah /Pemda dan Perpustakaan Non Pemda. Dari

tabel di bawah ini Jumlah Perpustakaan milik pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 12 buah sedangkan perpustakaan non pemda terjadi penambahan dimana tahun 2013 sebanyak 1.323 buah menjadi 1.340 pada tahun 2015.

Tabel II.106

Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d 2015
Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perpustakaan Milik Pemda	12	12	12	12	12
2.	Perpustakaan Non Pemda	N/A	1.323	1.323	1.340	1.340
3.	Jumlah Pengunjung	N/A	2.321	8.105	5.100	2.271

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun walaupun pada tahun 2013 meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di bawah sebesar 8.105 orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 5.100 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 2.271 orang.

2.3.1.23. Urusan Kearsipan

Tata kelola kearsipan daerah belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70%. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 baru sebanyak 20 arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 36, angka ini masih belum mencukupi.

2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

2.3.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lautan 79,80 persen dari total wilayahnya pasti memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.107.

**Tabel II.107**

Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)					Persentase
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	157.076,66	192.473,20	202.565,20	199.241,40	203.284,40	18,81 %
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	2.622,27	7.990,31	8.113,60	2.939,10	4.198,62	0,22 %

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 tercatat sebesar 4,198.62 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.939,08 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2014 disumbangkan oleh produksi rumput laut.

Produksi Budidaya terbesar berdasarkan media tebar adalah budidaya kolam yaitu sebesar 2.275,14 Ton dengan komoditas terbanyak dihasilkan adalah ikan lele sebanyak 1.613,57 ton, disusul oleh Budidaya Laut sebesar 1.088 dengan komoditas utama yaitu Rumput laut Cottoni sebesar 525 Ton dan disusul Budidaya Laut lainnya dengan komoditas kerang darah sebesar 445,13 Ton. Untuk Budidaya Tambak tercatat pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, dimana tercatat 0.12 ton dengan komoditas ikan nila.

b) Perikanan Tangkap

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 203,284.4 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 4,043 Ton dimana jumlah produksinya 199,241.4 ton. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2003, produksi terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 119,845,44 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 203,284.4 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

Pada tahun 2013, produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 18,81 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,22 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama nelayan.

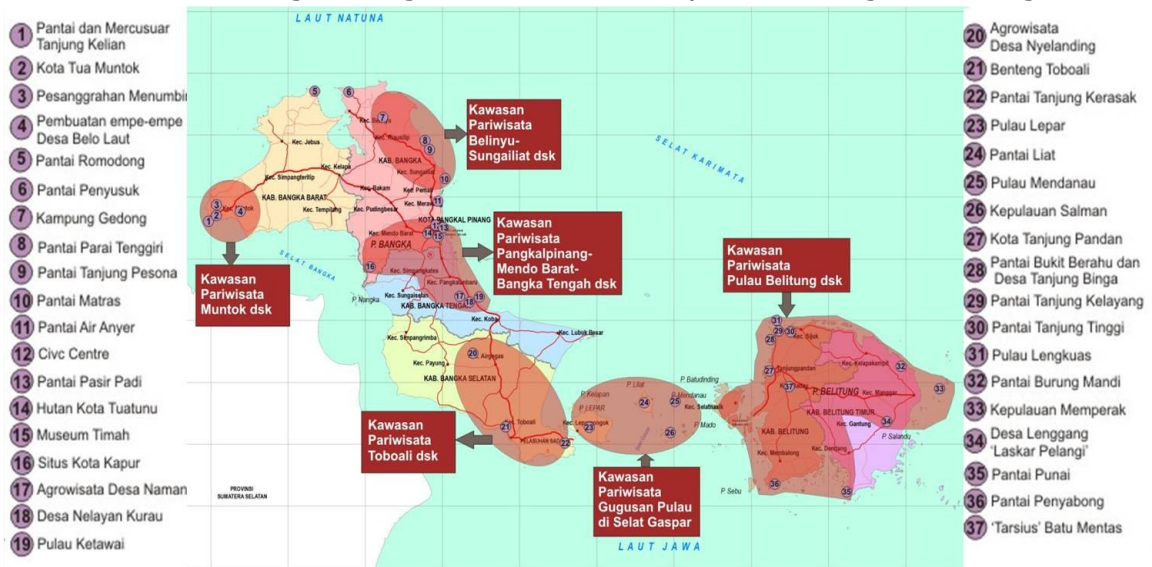
2.3.2.2. Urusan Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis pun mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.24 berikut.

Gambar II.24

Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel II.108Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	191.200	221.747	236.370	278.516	301.938
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.495	1.864	2.035	2.314	3.498
3.	Jumlah	192.695	223.611	238.405	280.830	305.436

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2016

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 305.436 orang.

2.3.2.3. Urusan Pertanian

Analisa berdasarkan produksi yaitu kenaikan produksi komoditi utama dan meningkatnya daya serap pasar dan lapangan usaha sektor pertanian seperti data dibawah ini :

Tabel II.109Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2010 – 2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,97	11,16	11,22	11,44	12,13
a. Tanaman Pangan	0,55	0,47	0,52	0,53	0,51
b. Tanaman Hortikultura	2,18	2,14	2,00	1,95	2,02
c. Tanaman Perkebunan	7,14	7,40	7,58	7,82	8,45
d. Peternakan	0,90	0,93	0,92	0,92	0,94
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik.

Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.110.

Tabel II.110
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pergunaan Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
I. LAHAN PERTANIAN	
I.1. Lahan Sawah	15.719
a. Irigasi	3.090
b. Tadah hujan	12.136
c. Pasang surut	18
d. Lebak	475
I.2. Lahan Bukan Sawah	1.108.567
a. Tegal	113.105
b. Ladang	30.348
c. Perkebunan	441.152
d. Hutan rakyat	47.753
e. Pengembalaan	1.815
f. Sementara tidak diusahakan	76.588
g. Lain-lain	397.806
Jumlah	1.642.027

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga

yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertanian, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

2.3.2.4. Urusan Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.111.

Tabel II.111
Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	466.090	432.884	432.882,82	432.883,52	432.883,52
Hutan Lindung	156.730	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34
Hutan Konservasi	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89
Hutan Produksi Konversi	N/A	692	692,59	692,59	692,59
Jumlah	657.510	659.014	659.019,85	659.013,52	654.561,34

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

2.3.2.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada

berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.112 berikut.

Tabel II.112

Potensi Bahan Galian Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pasir Kwarsa				1.482.301 ton	
2	Pasir Bangunan				666.188,06 ton	
3	Kaolin				205.487,50 ton	
4	Granit				55.508,29 m3	
5	Diabas				89.551,12 m3	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.3.2.6. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.113.

Tabel II.113Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekspor (us Dollar)	2.833	1.761,5	1.596,4	1.653,1	1.191,1
	Timah	2.089	1.527,9	1.374,9	1.376,8	973,2
	Non Timah	744	233,6	221,7	276,3	217,9
2.	Impor (us Dollar)	91,6	88,9	49,1	58	49,9
	Migas	18,6	15,3	14,3	20,3	31,4
	Non Migas	73	73,6	34,8	37,7	18,5

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2011, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.833 juta USD, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi 1.596,6 juta USD dan pada tahun 2015 terus menurun menjadi 1.191,1 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2011, impor mencapai 91,6 juta USD dan menurun pada tahun 2012 dan 2014 meningkat menjadi 58 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2015 menjadi 49,9 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2011 – 2015 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

2.3.2.7. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;

5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.114

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Industri Kecil	6.747	8.956	10.954	12.094
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09
2.	Industri Menengah	6.827	9.065	11.057	12.206
	Laju pertumbuhan	N/A	0,25	0,18	0,09

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel di atas laju pertumbuhan industri kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun, dimana tahun 2013 sebesar 0,25 % menurun menjadi 0,18 % tahun 2014 dan tahun 2015 kembalimenurun menjadi 0,09 %.

2.3.2.8. Urusan Transmigrasi

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan

kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.115.

Tabel II.115
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total Pengeluaran RT	14.992.051	15.454.545	16.063.117	16.671.130	17.264.384
2	Jumlah RT	320.077	327.278	334.550	341.867	349.534
3	Rasio	46,84	47,22	48,01	48,76	49,39

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Berdasarkan aspek kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan, yaitu membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan konsumsi makanan, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp. 14.992.051 pada tahun 2011 menjadi Rp. 17.264.384 pada tahun 2015 atau rata-rata peningkatan 3,59 persen per tahun. Peningkatan juga terlihat dari besaran ratio setiap tahunnya, yaitu sebesar 49,39 pada tahun 2015. Peningkatan ini cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung akan terus meningkat setiap tahunnya.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.116.

Tabel II.116
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,57	121,70	123,52	118,81	122,06
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	118,55	122,73	122,89	116,18	107,45
3	Rasio	0,99	0,99	1,01	1,02	1,14

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel II.109 maka diperoleh kondisi bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan trend yang terus meningkat dan pada tahun 2015 NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada angka 116. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah semakin sejatara.

C. Pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk nonpangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan

perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.117 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar Rp. 8.065.723,37 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 9.286.512,45 pada tahun 2015.

Tabel II.117
Persentase Konsumsi RTN Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.065.723	8.339.273	8.746.368	9.082.432	9.286.512
2	Total pengeluaran	14.992.051	15.454.545	16.063.118	16.671.131	17.264.385
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.118 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.

Tabel II.118
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita
Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	8.405.782,57	15.398.026,32	0,5459
2	Kabupaten Bangka Barat	9.447.327,08	17.744.791,67	0,5324
3	Kabupaten Bangka Selatan	9.461.271,19	17.372.881,36	0,5446
4	Kabupaten Bangka Tengah	8.963.538,30	16.486.184,11	0,5437
5	Kabupaten Belitung	11.846.791,45	15.524.559,63	0,7631
6	Kabupaten Belitung Timur	10.027.771,61	18.149.812,86	0,5525
7	Kota Pangkalpinang	9.237.663,68	16.771.357,44	0,5508
Provinsi		9.082.432,14	16.671.130,95	0,5448

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

D. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.119.

Tabel II.119
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	4.604	2.061	19.664	12.532	12.532
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	17	39	40	40
3	Rasio daya serap tenaga kerja	920,80	121,23	504,20	313,30	313,30

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

A. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan.

Tabel II.120
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2	Jumlah Kendaraan	323.429	381.099	396.676	395.951	398.065
3	Rasio	0.0028	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2011-2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun dimana tahun 2011 sebesar 0,0028 turun pada tahun 2014 menjadi 0,0024 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,0023.

Tabel II.121Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	734,5	79.548	0.0092
2	Kabupaten Bangka Barat	847,44	42.514	0.0199
3	Kabupaten Bangka Selatan	569,47	40.218	0.0142
4	Kabupaten Bangka Tengah	292,48	41.293	0.0071
5	Kabupaten Belitung	624,67	68.186	0.0092
6	Kabupaten Belitung Timur	480,88	42.134	0.0114
7	Kota Pangkalpinang	356,10	84.172	0.0042
Provinsi		9.082.432,14	16.671.130,95	0,5448

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki rasio paling rendah, hal ini karena Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang relatif kecil namun jumlah kendaraan yang sangat banyak sehingga rasionya menjadi kecil, sedangkan Kabupaten Bangka Barat memiliki rasio yang paling besar yaitu 0,0199.

B. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.122.

Tabel II.122Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	12.350 Ha	282.719 Ha	0.04
2	Kabupaten Bangka Barat	15.560 Ha	266.501 Ha	0.06
3	Kabupaten Bangka Selatan	18.155 Ha	342.553 Ha	0.05
4	Kabupaten Bangka Tengah	23.741 Ha	188.895 Ha	0.13
5	Kabupaten Belitung	46.225 Ha	183.144 Ha	0.25
6	Kabupaten Belitung Timur	40.709 Ha	269.982 Ha	0.19
7	Kota Pangkalpinang	-	11.880 Ha	0.00
Jumlah		156.740 Ha	1.485.674 Ha	0.11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

C. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.123.

Tabel II.123
Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,60	4,07	4,25	5,83	3,21
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22	22	26	26	26
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	75	75	100
4.	Persentase Penduduk berakses airminum	15,02	15,19	29,29	64,98	46,22
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	65,69	69,9	69,13	67,95	80,96
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	48,06	62,76	92,81	80,96	88,96
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,67	0,61	0,65	0,66	0,68
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,87	0,84	0,93	0,95	0,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

2.4.3. Fokus iklim berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Tabel II.124Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	seksusal	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
Total		2625	1429	2654	1685	2158	1282	2478	1489	816	302

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

*Tahun 2016 data sampai dengan bulan Mei.

Keterangan:

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula Penyelesaian Tindak Pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan.

B. Jumlah Demo

Tabel II.125

Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Bidang Politik	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	8	7	10	24	15
3	Pemogokan Kerja	4	1	2	3	-
4	Jumlah unjuk rasa	14	9	17	30	17

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

C. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Tabel II.126

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		3	3	4	

B. Kemudahan Perizinan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan saat ini telah melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.135 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2013-2015 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani

masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tabel II.127

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta)

No	Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	149.719,57	162.036,29	172.239,98
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	154.884,48	139.175,29	110.239,08
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	139.313,51	163.479,97	165.429,32
4	Pajak Air Permukaan	3.544,64	4.036,07	4.680,32
5	Pajak Rokok	-	39.534,99	54.176,24
Jumlah		447.462.20	508.262.61	506.764,94

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari data realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2014 besar PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 508.262.610 menurun di tahun 2015 menjadi sebesar 506.764.940.

D. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.136, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 8 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah.

Tabel II.128
Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Yang Mendukung Iklim Investasi

No	Nomor	Perda
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

A. Kualitas tenaga kerja(Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaganya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.129

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

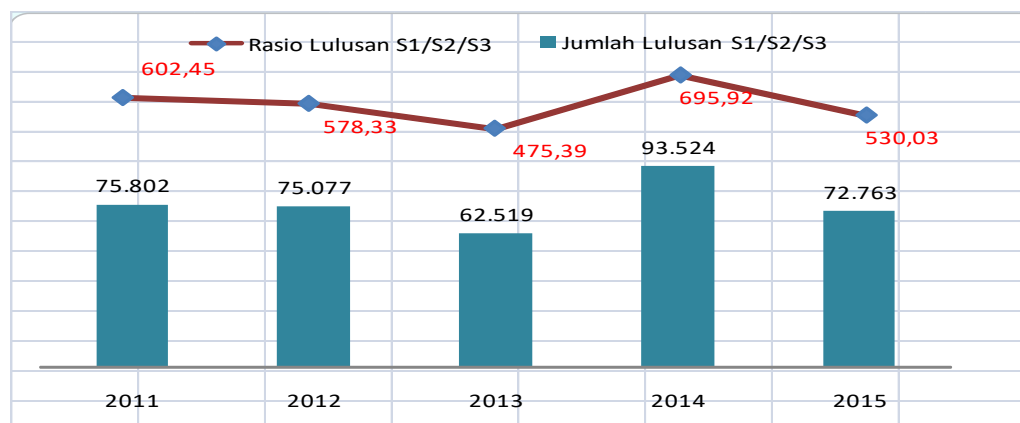
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	75.802	75.077	62.519	93.524	72.763
2.	Jumlah penduduk	1.258.234	1.298.168	1.315.123	1.343.881	1.372.813
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	602,45	578,33	475,39	695,92	530,03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan grafik gambar II.25 di bawah dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) cenderung berfluktuasi dimana tahun 2011 sebesar 602,45 per-10.000 penduduk sedangkan tahun 2015 menurun menjadi 530,03 per-10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/ perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per-10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

Gambar II.25

Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.130 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 sebesar 47,98 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 47,35 dan kembali mengalami hingga tahun 2015 rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 46,83. Ini mengindikasikan bahwa tingkat ketegantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk yang produktif untuk lima tahun terakhir semakin kecil dan jumlah penduduk usia kerja menjadi semakin besar dibandingkan dengan penduduk bukan usia kerja.

Tabel II.130

Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	361.800	365.752	369.912	377.995	386.133
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	46.154	47.690	49.520	50.602	51.688
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	407.954	413.442	419.432	428.597	437.821
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	850.280	873.109	895.691	915.284	934.992
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	47,98	47,35	46,83	46,83	46,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.5. Evaluasi Ketercapaian Indikator RPJPD

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari implementasi sebuah kebijakan yang telah dilakukan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. RPJMD 2012–2017 merupakan tahapan kedua dari RPJPD 2005–2025, oleh karenanya sebelum menyusun kebijakan pembangunan 2012–2017 perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap capaian dari target indikator kinerja RPJPD pada tahapan pertama (2005–2007). Hal tersebut sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel II.131

Capaian Dan Target Indikator Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

No.	Indikator pencapaian misi daerah	Target 2005-2012	Realisasi (2012)	Target 2012-2017	Realisasi (2016)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas ADH Konstan (Persen)	4,98	5,50	4,84	4,11
2.	Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	23,79	17,64	18,64	19,03
3.	Rata-rata kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	0,10	6,20	6,44	6,65
4.	Rata-rata kontribusi sector Industri terhadap PDRB (%)	22,24	24,45	23,03	22,32
5.	Rata-rata kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	13,29	13,78	13,86	13,96
6.	Rata-rata kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi(%)	3,01	3,45	3,59	3,67
7.	Rata-rata kontribusi sector Jasa-jasa terhadap PDRB	26,55	28,68	30,62	31,47

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015, 2014

Tabel II.132

Capaian Dan Target Indikator Peningkatan Kualitas SDM RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Target 2005–2012	Realisasi (2012)	Target 2012–2017	Realisasi (2014)
(1)	(2)			(3)
Pendidikan				
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah	98,33			94,63
a. SD	85,73			65,90
b. SMP/MTs	57,97			46,46
c. SMA/SMK/MA				
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah	100			99,50
a. Usia 7-12	98,00	103,9		98,20
b. Usia 13 - 15	80,00	91,01		78,70
c. Usia 16 - 18		39,12		
3. Angka Putus Sekolah				
a. SD	0,60	0,4		0,50
b. SMP	2,30	0,93		2,75
c. SMU/SMK	1,50	1,74		1,20
4. Angka Mengulang Kelas				
a. SD	7,96			7,50
b. SMP	0,65			0,70
c. SMU/SMK	0,32			0,37



Indikator Pencapaian Misi Daerah	Target 2005–2012	Realisasi (2012)	Target 2012–2017	Realisasi (2014)
(1)	(2)			(3)
5. Standar Pendidikan Gurusetara S1				
a. SD	48,51			47,37
b. SMP	73,39			74,57
c. SMU/SMK)	85,24			86,96
6. Angka Indeks Melek Huruf	92			95,83
7. Angka Partisipasi Kasar untuk SD/ Mi	129,00			114,64
8. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP danyang sederajat	95,36			92,07
	76,74			76,06
9. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA danyang sederajat	6,27			6,37
10. Angka Kelulusan Sisw dalam Ujian Akhir Nasional (UAN)	6,09			6,42
	6,24			6,01
a. SD/MI				
b. SMP/MTs				
c. SMA/SMK/MA				
Kesehatan				
1. Usia Harapan Hidup	72,4			69,2
2. Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup	23			8,39
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran	98			149,83
	90			92
4. Persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan	24			24,17
	6			5,07
5. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	11			4,99
6. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	117,5			296,75
7. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	100			94,14
8. Rasio perawat per 100.000 penduduk	40			11,89
9. Rasio bidan per 100.000 penduduk	2,1			1,66
10. Rasio sanitarian per 100.000 penduduk	30			1,57
11. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	65			66
12. Persentase Posyandu Mandiri	30			4,1
13. Persentase cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
14. Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk				
Kependudukan				
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,2			3,14
2. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)	2,4			2,7
3. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)	1,45			1,7

Sumber : Dindik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 (Data Sektoral)

Tabel II.133

Capaian dan Target Indikator Misi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi 2005	Target 2005–2012	Realisasi (2012)	Target 2012–2017	Realisasi (2015)	Target 2017-2022	Target 2022-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Good Governance							
1. Indeks Korupsi	0,35	0,30	n.a.	0,25	n.a.	0,20	0,10

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi 2005	Target 2005–2012	Realisasi (2012)	Target 2012–2017	Realisasi (2015)	Target 2017-2022	Target 2022-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(Corruption Index)							
2. Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan	5,00	10,00	n.a.	15,00	n.a.	25	50
3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi*	n.a.	n.a.	69,37	72,31	72,31	76,00	77,50
4. Indeks Reformasi Birokrasi*	-	-	-	63,16	63,16	67,00	70,00
5. Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur*	44:56	74:26	80:20	80:20	80:20	67:33	78:22

*) Indikator Baru (penjelasan di bab III).

a) Indeks Korupsi (*Corruption Index*)

Lembaga Transparency International mengumumkan adanya perbaikan indeks persepsi korupsi/*Corruption Perception Index* (IPK) Indonesia untuk tahun 2015. IPK adalah indeks gabungan yg mengacu pada 13 sumber data, seperti World Economic Forum 2015 dan Bertelsman Foundation Index. IPK menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan dan politik. Menurut laporan tersebut, Indonesia mengalami kenaikan peringkat diantara negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Skor IPK Indonesia untuk tahun 2015 mencapai 36. Jumlah tersebut meningkat dua poin dibanding skor IPK 2014 yaitu 34. Dengan kenaikan skor tersebut, peringkat korupsi Indonesia turun dari peringkat 107 ke peringkat 88, dari 168 negara.

b) Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak pemilihan aparatur pemerintah di daerah, seperti pemilihan Anggota DPRD. Selanjutnya peran serta masyarakat dapat diwujudkan pula dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik di daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sampai dengan tahun 2016 belum diperoleh data yang dapat menggambarkan Tingkat Partisipasi Publik dalam proses pembuatan Kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun mengingat pentingnya indikator ini maka perlu tetap dimunculkan dalam dokumen RPJPD dengan melibatkan instansi berwenang seperti Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data tersebut.

Tabel II.134

Capaian Dan Target Indikator Pemerataan Pembangunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Target 2005–2012	Realisasi (2012)	Target 2012–2017	Realisasi (2014)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indeks Pembangunan Perempuan (Gender Development Indeks)	50			60.36
2. Indeks Pemberdayaan Perempuan (<i>Gender Empowerment Measurement</i>)	40			55.62
3. Prosentase masyarakat pra sejahtera	10			0.94
4. Rasio pekerja perempuan	33			32.52
5. Rasio Perempuan dalam Parlemen (DPRD)	7			9
	45			40
	30			32
6. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses terhadap fasilitas air bersih				
7. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses				

Sumber : RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025

2.6 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPJPD Sampai dengan Tahun 2015

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi

bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi sebagaimana mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.

Adapun pengendalian kebijakan terhadap RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 adalah sebagaimana disajikan didalam tabel II.135.

Tabel II.135

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan penyusunan rencanan kerja	v			
2	Penyiapan data dan informasi	v			
3	Penelaahan RTRW provinsi	v			
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi	v			
5	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi	v			
6	Penelaahan RPJPN	v			
7	Analisis isu-isu strategis provinsi	v			
8	Perumusan visi dan misi daerah provinsi	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
9	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	v			
10	Perumusan arah kebijakan	v			
11	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional	v			
12	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi meliputi:	v			
12.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:	v			
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	v			
	2. Kawasan perlindungan setempat	v			
	3. Kawasan suaka alam	v			
	4. Kawasan pelestarian alam	v			
	5. Kawasan rawan bencana alam	v			
	6. Kawasan lindung lainnya	v			
	b. Kawasan Budi Daya:	v			
	1. Kawasan hutan produksi	v			
	2. Kawasan pertanian	v			
	3. Kawasan pertambangan	v			
	4. Kawasan industri	v			
	5. Kawasan pariwisata	v			
	6. Kawasan permukiman	v			
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah	v			
12.b.	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada:				
	a. Sistem perkotaan provinsi;	v			
	b. Sistem jaringan transportasi provinsi;	v			
	c. Sistem jaringan energi provinsi;	v			
	d. Sistem jaringan telekomunikasi provinsi;	v			
	e. Sistem jaringan sumber daya air;	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
13	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi memperhatikan RPJPD daerah lainnya	v			
14	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional	v			
15	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah memperhatikan RTRW daerah lainnya	v			
16	Pelaksanaan forum konsultasi publik	v			
17	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD provinsi	v			
18	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	v			
19	Musrenbang RPJPD provinsi menyepakati:	v			
19.a.	Penajaman visi dan misi daerah;	v			
19.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;	v			
19.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah	v			
19.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;	v			
19.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah	v			
20	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD		v		
21	Penyusunan rancangan akhir	v			
22	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya	v			
23	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya	v			
24	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
25	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional	v			
26	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	v			
27	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD provinsi		v		
28	Dokumen RPJPD provinsi yang telah disyahkan		v		

Tabel II.136
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan:	Visi dan Misi:					
Visi:	Visi:					
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan		v	Dianggap kurang relevan karena unsur SDM dan pemerintah yang tergambarkan dalam visi RPJPD tidak dicerminkan dalam visi RPJMD walau terdapat substansi lain yang saling berkaitan	Dalam perancangan visi RPJMD berikutnya agar disesuaikan dengan visi RPJPD Provinsi dengan memperhatikan substansi yang terkait	
Misi:	Misi:					
1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah.	1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan	v		Relevan, karena misi RPJMD selaras dengan misi RPJPD	Untuk perancangan misi RPJMD berikutnya agar lebih baik dan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
					terarah	
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imitaq	2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia	v		Relevan, karena misi RPJMD selaras dengan misi RPJPD	Untuk perancangan misi RPJMD berikutnya agar lebih ditingkatkan dan mendetail	
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil	5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government	v		Relevan, karena misi RPJMD selaras dengan misi RPJPD walau belum mendetail	Untuk perancangan misi RPJMD berikutnya agar lebih terfokus pada perwujudan good governance melalui upaya-upaya yang nyata	
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender	4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	v		Relevan, karena masih terdapat berkesinambungan pada misi RPJMD dan RPJPD walau pada misi RPJMD tidak dijelaskan secara mendetail	Untuk perancangan misi RPJMD berikutnya agar lebih baik, terarah dan mendetail	
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang	3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	v		Relevan, karena terdapat keselarasan pada misi RPJMD dan RPJPD	Untuk perancangan misi RPJMD berikutnya agar lebih terarah	
Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:					



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
1. Arah Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal	1. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya	v		Relevan, karena arah kebijakan 1 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	2. Perluasan aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 2 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	3. Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi	v		Relevan, karena arah kebijakan 3 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	4. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama perdagangan	v		Relevan, karena arah kebijakan 4 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan, terarah dan ditingkatkan	
	5. Pengembangan promosi produk-produk unggulan daerah	v		Relevan, karena arah kebijakan 5 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	6. Peningkatan DBH di sektor tambang dalam pengembangan perekonomian di Bangka Belitung	v		Relevan, karena arah kebijakan 6 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	7. Pengembangan program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung termasuk pengembangan pariwisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 7 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	8. Peningkatan kapasitas SDM	v		Relevan, karena unsur SDM sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi lokal	Kapasitas dan kualitas SDM agar ditingkatkan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	9. Pembentukan OVOP	v		Relevan, karena arah kebijakan 9 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat konsisten dan berkelanjutan	
	10. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian dan pariwisata Bangka Belitung	v		Relevan, karena arah kebijakan 10 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan dan berkelanjutan	
	11. Pengembangan desa mandiri pangan	v		Relevan, karena arah kebijakan 11 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan dan berkelanjutan	
	12. Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman	v		Relevan, karena arah kebijakan 12 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan dan berkelanjutan	
	13. Pengembangan desa mandiri energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 13 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan dan berkelanjutan	
	14. Penyediaan data dan informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	v		Relevan, karena data dan informasi yang ada mengenai sumberdaya, sarana dan prasarana daerah merupakan unsur yang penting dalam menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar data dan informasi yang ada disampaikan secara benar dan dilakukan pembaharuan data dan informasi setiap tahunnya	
	15. Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil se-Bangka Belitung	v		Relevan, karena arah kebijakan 15 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	16. Peningkatan aksesibilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan	v		Relevan, karena arah kebijakan 16 dapat menunjang pembangunan	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	perkotaan			ekonomi lokal		
	17. Peningkatan ketahanan pangan daerah	v		Relevan, karena arah kebijakan 17 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	18. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	v		Relevan, karena arah kebijakan 18 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	19. Peningkatan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan	v		Relevan, karena arah kebijakan 19 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	20. Pengembangan ruang usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi Mitan ke LPG 3 Kg	v		Relevan, karena arah kebijakan 20 dapat menunjang pembangunan ekonomi lokal	Agar dapat dikembangkan	
2. Arah Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Percepatan derajat kesehatan masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 1 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	2. Pengembangan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar	v		Relevan, karena arah kebijakan 2 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	3. Peningkatan layanan pendidikan di semua jenjang pada masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 3 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	4. Pengembangan budaya membaca dan menulis, serta pembinaan perpustakaan	v		Relevan, karena arah kebijakan 4 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	5. Peningkatan SDM kearsipan, Sadar Arsip dan pelayanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi	v		Relevan, karena arah kebijakan 5 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	6. Pemberian beras gratis kepada masyarakat miskin	v		Relevan, karena arah kebijakan 6 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	7. Peningkatan pembiayaan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 7 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	8. Penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergitas semua sektor	v		Relevan, karena arah kebijakan 8 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan berkelanjutan	
	9. Peningkatan perencanaan dan koordinasi terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan		v	Tidak relevan, karena substansi arah kebijakan 9 dianggap tidak berpengaruh langsung dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia	Agar dapat disesuaikan dengan arah kebijakan RPJPD	
	10. Pengembangan dan pemanfaatan SDA pedesaan dan sistem pengembangan ekonomi wilayah Transmigrasi		v	Tidak relevan, karena substansi arah kebijakan 10 dianggap tidak berpengaruh langsung dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia	Agar dapat disesuaikan dengan arah kebijakan RPJPD	
	11. Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan pengembangan kawasan Transmigrasi	v		Relevan, karena arah kebijakan 11 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, peningkatan kualitas pemerintahan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan	v		Relevan, karena arah kebijakan 12 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	v		Relevan, karena arah kebijakan 13 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	14. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender	v		Relevan, karena arah kebijakan 14 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	15. Perencanaan dan penganggaran responsif Gender	v		Relevan, karena arah kebijakan 15 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	
	16. Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum	v		Relevan, karena arah kebijakan 16 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	17. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan pariwisata daerah	v		Relevan, karena arah kebijakan 17 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	
	18. Permasalahan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga	v		Relevan, karena arah kebijakan 18 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	19. Peningkatan kerukunan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara	v		Relevan, karena arah kebijakan 19 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	20. Peningkatan kualitas budaya berbasis agama	v		Relevan, karena arah kebijakan 20 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	21. Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah dan Berbasis Masyarakat pada setiap jenjang pendidikan	v		Relevan, karena arah kebijakan 21 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	22. Peningkatan peran masyarakat di daerah tujuan wisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 22 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	23. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman	v		Relevan, karena arah kebijakan 23 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	24. Peningkatan kreatifitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film	v		Relevan, karena arah kebijakan 24 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	25. Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa	v		Relevan, karena arah kebijakan 25 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	26. Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya	v		Relevan, karena arah kebijakan 26 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	27. Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana maupun sistem dan manajemen pendidikan	v		Relevan, karena arah kebijakan 27 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	28. Peningkatan alokasi beasiswa semua jenjang pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu	v		Relevan, karena arah kebijakan 28 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	29. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 29 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	30. Pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS	v		Relevan, karena arah kebijakan 30 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	31. Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan koperasi dan UMKM	v		Relevan, karena arah kebijakan 31 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	32. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak TK dan wirausaha baru yang berdaya saing	v		Relevan, karena arah kebijakan 32 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	33. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri	v		Relevan, karena arah kebijakan 33 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan berkelanjutan	
	34. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis	v		Relevan, karena arah kebijakan 34 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	35. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3, serta penegakan hukum	v		Relevan, karena arah kebijakan 35 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	36. Revitalitas balai latihan kerja industri	v		Relevan, karena arah kebijakan 36 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	37. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda	v		Relevan, karena arah kebijakan 37 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	38. Peningkatan pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal	v		Relevan, karena arah kebijakan 38 dapat menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
3. Arah Reformasi Birokrasi menuju ketatapemerintahan yang Baik	1. Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur	v		Relevan, karena arah kebijakan 1 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	2. Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 2 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	3. Peningkatan Penegakan peraturan kepegawaian secara tegas dengan menerapkan sistem "reward and punishment"	v		Relevan, karena arah kebijakan 3 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan	v		Relevan, karena arah kebijakan 4 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	5. Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan e-goverment dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien	v		Relevan, karena arah kebijakan 5 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	6. Penguatan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 6 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	7. Peningkatan kontrol lembaga non-pemerintah untuk mengawasi kinerja pemerintah	v		Relevan, karena arah kebijakan 7 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	8. Percepatan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh	v		Relevan, karena arah kebijakan 8 dapat menunjang dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
4. Arah Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri dan berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi tingkat pencemaran	v		Relevan, karena arah kebijakan 1 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
				berkelanjutan		
	2. Pengelolaan sumber daya alam untuk mengendalikan sampah dan lahan perkotaan	v		Relevan, karena arah kebijakan 2 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	3. Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	v		Relevan, karena arah kebijakan 3 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	4. Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokalitas untuk mengendalikan dampak lingkungan	v		Relevan, karena arah kebijakan 4 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	5. Pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan sumber daya alam	v		Relevan, karena arah kebijakan 5 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	6. Percepatan rehabilitasi lahan kritis di darat dan laut disertai dengan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	v		Relevan, karena arah kebijakan 6 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	7. Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang	v		Relevan, karena arah kebijakan 7 dapat menunjang dalam mewujudkan lingkungan hidup sehat, asri dan berkelanjutan	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
5. Arah peningkatan pembangunan yang adil dan merata	1. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah	v		Relevan, karena arah kebijakan 1 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	2. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat	v		Relevan, karena arah kebijakan 2 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dikembangkan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	3. Pemerataan akses teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 3 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	4. Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 4 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	5. Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau untuk meningkatkan transportasi barang dan orang serta juga mendukung perkembangan pariwisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 5 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	
	6. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur guna mendukung daya saing sektor ril	v		Relevan, karena arah kebijakan 6 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	7. Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi	v		Relevan, karena arah kebijakan 7 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan dan dikembangkan	
	8. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah	v		Relevan, karena arah kebijakan 8 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan	
	9. Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan	v		Relevan, karena arah kebijakan 9 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	10. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengembangkan daerah potensial dan pengembangan potensi lokal	v		Relevan, karena arah kebijakan 10 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	11. Pengembangan Kawasan lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka	v		Relevan, karena arah kebijakan 11 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	12. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung)	v		Relevan, karena arah kebijakan 12 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	13. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota	v		Relevan, karena arah kebijakan 13 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	14. Pelaksanaan program MP3EI diwilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi	v		Relevan, karena arah kebijakan 14 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	15. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung	v		Relevan, karena arah kebijakan 15 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	



RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah					
	16. Peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan	v		Relevan, karena arah kebijakan 16 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	17. Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kelian Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi	v		Relevan, karena arah kebijakan 17 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	18. Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah	v		Relevan, karena arah kebijakan 18 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	19. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal	v		Relevan, karena arah kebijakan 19 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	20. Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional	v		Relevan, karena arah kebijakan 20 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
	21. Pengembangan Desa-desa pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata	v		Relevan, karena arah kebijakan 21 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	22. Perencanaan dan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang professional, akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur	v		Relevan, karena arah kebijakan 22 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, ditingkatkan dan berkelanjutan	
	23. Percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial lainnya sebagai upaya untuk pengembangan kawasan strategis dan pengembangan potensi lokal di Bangka Belitung	v		Relevan, karena arah kebijakan 23 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	24. Rintisan Pelabuhan Tanjung Berikat - Tanjung Batu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	v		Relevan, karena arah kebijakan 24 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan dan berkelanjutan	
	25. Peningkatan dan pengembangan kawasan KTM Batu Betumpang sebagai upaya untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru	v		Relevan, karena arah kebijakan 25 dapat menunjang dalam meningkatkan pembangunan yang adil dan merata	Agar dapat dipertahankan, dikembangkan, ditingkatkan dan berkelanjutan	

Tabel II.137

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi " Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera"

Periode Pelaksanaan : 2005 - 2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	8 Faktor Penghambat	9 Faktor Pendorong	
Misi 1: Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah	-	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas ADH Konstan	4,98	4,85	4,98	5,34	-	-	5,82	6,4	-	-	116,87	119,85	-	-	-	-	-
	-	Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	23,79	24,45	23,79	23,86	-	-	17,8	22,43	-	-	74,82	94,006	-	-	-	-	-
	-	Rata-rata kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	0,1	0,3	0,1	0,15	-	-	6,26	6,83	-	-	6260	4553,3	-	-	-	-	-
	-	Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	22,24	23,27	22,24	22,66	-	-	24,68	20,98	-	-	110,97	92,59	-	-	-	-	-
	-	Rata-rata kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,29	14,29	13,29	13,39	-	-	20,3	20,03	-	-	152,74	149,59	-	-	-	-	-



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut	
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10		
	-	Rata-rata kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi	3,01	2,56	3,01	2,88	-	-	4,66	3,73	-	-	154,81	129,5	-	-	-	-	-	
	-	Rata-rata kontribusi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB	5,83	5,21	5,83	5,63	-	-	0,61	7,63	-	-	10,46	135,5	-	-	-	-	-	
	-	Peningkatan Peran UKM jumlah unit usaha kecil	1.100	1.300	1.100	1.150	-	-	-	296.788	-	-	25807,65	-	-	-	-	-	-	
Misi 2: Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan lmtaq	-	Pendidikan																		
	-	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah																		
	-	a. SD	98,33	99	98,33	98,56	-	-	-	94,63	-	-	-	96,01	-	-	-	-	-	-
	-	b. SMP/MTs	85,73	98	85,73	89,82	-	-	-	65,9	-	-	-	73,36	-	-	-	-	-	-
	-	c. SMA/SMK/MA	57,97	95	57,97	70,31	-	-	-	46,46	-	-	-	66,08	-	-	-	-	-	-
	-	2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah																		
	-	a. Usia 7-12	100	100	100	100	-	-	103,9	99,5	-	-	103,9	99,5	-	-	-	-	-	-
	-	b. Usia 13 - 15	98	100	98	100	-	-	91,01	98,2	-	-	92,87	98,2	-	-	-	-	-	-
	-	c. Usia 16 - 18	80	100	80	100	-	-	39,12	78,7	-	-	48,9	78,7	-	-	-	-	-	-
-	3. Angka Putus Sekolah																			



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	8	9	
1	2		3	4	5				6				7				8	9	10
-	a. SD		0,6	0,11	0,6	0,4	-	-	0,4	0,5	-	-	66,67	125	-	-	-	-	-
-	b. SMP		2,3	1,44	2,3	2,1	-	-	0,93	2,75	-	-	40,43	130,95	-	-	-	-	-
-	c. SMU/SMK		1,5	0,9	1,5	1,3	-	-	1,74	1,2	-	-	116	92,3	-	-	-	-	-
-	4. Angka Mengulang Kelas																		
-	a. SD		7,96	3,46	7,96	6,71	-	-	-	7,5	-	-	-	111,77	-	-	-	-	-
-	b. SMP		0,65	0,2	0,65	0,5	-	-	-	0,7	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	c. SMU/SMK		0,32	0,1	0,32	0,26	-	-	-	0,37	-	-	-	142,3	-	-	-	-	-
-	5. Standar Pendidikan Guru setara S1																		
-	a. SD		48,51	100	48,51	80,85	-	-	-	47,37	-	-	-	58,59	-	-	-	-	-
-	b. SMP		73,39	100	73,39	100	-	-	-	74,57	-	-	-	74,57	-	-	-	-	-
-	c. SMU/SMK)		85,24	100	85,24	100	-	-	-	86,96	-	-	-	86,96	-	-	-	-	-
-	6. Angka Indeks Melek Huruf		92	97	92	94	-	-	-	95,83	-	-	-	101,94	-	-	-	-	-
-	7. Angka Partisipasi Kasar untuk SD / Mi		129	130	129	130	-	-	-	114,64	-	-	-	88,18	-	-	-	-	-
-	8. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP dan yang sederajat		95,36	113,26	95,36	102,42	-	-	-	92,07	-	-	-	89,89	-	-	-	-	-
-	9. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA dan yang sederajat		76,74	110	76,74	87,83	-	-	-	76,06	-	-	-	86,6	-	-	-	-	-
-	10. Angka Kelulusan Siswa dalam Ujian Akhir Nasional (UAN)																		



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	8	9	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10	
-	a. SD/MI	6,27	7,5	6,27	6,98	-	-	-	6,37	-	-	-	-	91,26	-	-	-	-	-
-	b. SMP/MTs	6,09	7,25	6,09	6,48	-	-	-	6,42	-	-	-	-	99,07	-	-	-	-	-
-	c. SMA/SMK/MA	6,24	7	6,24	6,47	-	-	-	6,01	-	-	-	-	92,89	-	-	-	-	-
-	Kesehatan																		
-	1. Usia Harapan Hidup	72,4	75	72,4	73	-	-	-	69,2	-	-	-	-	94,79	-	-	-	-	-
-	2. Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup	23	10	23	20	-	-	-	8,39	-	-	-	-	41,95	-	-	-	-	-
-	3. Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran	98	60	98	80	-	-	-	149,83	-	-	-	-	187,29	-	-	-	-	-
-	4. Persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan	90	100	90	92	-	-	-	92	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	5. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	24	40	24	30	-	-	-	24,17	-	-	-	-	80,57	-	-	-	-	-
-	6. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6	12	6	8	-	-	-	5,07	-	-	-	-	63,375	-	-	-	-	-
-	7. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11	17	11	13	-	-	-	4,99	-	-	-	-	38,38	-	-	-	-	-
-	8. Rasio perawat (D3) per 100.000 penduduk	117,5	150	117,5	125	-	-	-	296,75	-	-	-	-	237,4	-	-	-	-	-
-	9. Rasio bidan per 100.000 penduduk	100	120	100	105	-	-	-	94,14	-	-	-	-	89,65	-	-	-	-	-



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	8	9	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10	
	-	10. Rasio sanitarian per 100.000 penduduk	40	55	40	45	-	-	-	11,89	-	-	-	26,42	-	-	-	-	-
	-	11. Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2,1	0,5	2,1	1,5	-	-	-	1,66	-	-	-	110,67	-	-	-	-	-
	-	12. Persentase Posyandu Mandiri	30	55	30	40	-	-	-	1,57	-	-	-	3,925	-	-	-	-	-
	-	13. Persentase cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65	80	65	70	-	-	-	66	-	-	-	94,28	-	-	-	-	-
	-	14. Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk	30	15	30	25	-	-	-	4,1	-	-	-	16,4	-	-	-	-	-
	-	Kependudukan																	
	-	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,1	1,7	2,1	2	-	-	-	3,14	-	-	-	157	-	-	-	-	-
	-	2. Total Fertility Penduduk	2,2	1,8	2,2	2,1	-	-	-	2,7	-	-	-	128,57	-	-	-	-	-
	-	3. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	2	10	2	4	-	-	-	1,7	-	-	-	42,5	-	-	-	-	-
Misi 3: Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan	-	Good Governance																	
	-	1. Indeks Korupsi	0,3	0,1	0,3	0,25	-	-	-	0,22	-	-	-	88	-	-	-	-	-



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	8	9	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10	
demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil	-	2. Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan	10	50	10	15	-	-	-	12	-	-	-	80	-	-	-	-	-
Misi 4: Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana	-	1. Indeks Pembangunan Perempuan	50	58	50	52	-	-	-	60,36	-	-	-	116,07	-	-	-	-	-
	-	2. Indeks Pemberdayaan Perempuan	40	48	40	42	-	-	-	55,62	-	-	-	132,42	-	-	-	-	-
	-	3. Prosentase masyarakat pra sejahtera	10	7.5	10	9	-	-	-	0,94	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-
	-	4. Rasio pekerja perempuan	33	40	33	35	-	-	-	32,52	-	-	-	92,91	-	-	-	-	-
	-	5. Rasio perempuan dalam Parlemen	7	25	7	10	-	-	-	9	-	-	-	90	-	-	-	-	-
	-	6. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses terhadap fasilitas air bersih	45	35	45	40	-	-	-	40	-	-	-	100	-	-	-	-	-



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
					5				6				7				8	9	
1	2		3	4	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	2005-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	10
ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender	-	7. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan	30	22,5	30	27,5	-	-	-	32	-	-	-	116,36	-	-	-	-	-
Misi 5: Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang	-	1. Angka Illegal Fishing per tahun	8	0	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B A B III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.1. Urusan Wajib

3.1.1.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- 1) Tingginya angka anak putus sekolah (*Drop Out*) khususnya pendidikan menengah. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Selain itu secara tidak langsung kondisi geografis juga sangat mempengaruhi dan sarana transportasi masih kurang sehingga anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai sekolah mereka;

- 2) Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja.
- 3) Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang. Guru yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal tentunya akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mereka, sehingga apa yang telah didapatkan selama pendidikan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah;
- 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas pengembangan pendidikan kejuruan.

b. Urusan Kesehatan

- 1) Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan lingkungan misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak;
- 2) Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dibandingkan Angka Harapan Hidup Nasional;
- 3) Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi;
- 4) Masih terbatasnya Jumlah tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca;
- 2) Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah dibanding kebutuhan terhadap *life time* & panjang penanganan jalan & jembatan;
- 3) *Backlog* perumahan belum terdata dengan baik;
- 4) Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat;

- 5) Cakupan layanan sanitasi saat ini masih rendah;
- 6) Belum adanya TPA Regional dan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R;
- 7) Penanganan kawasan kumuh yang belum terintegrasi antara sektoral serta pemerintah daerah kab/kota;
- 8) Permasalahan banjir;
- 9) Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan;
- 10) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi;
- 11) Tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembangunan;
- 12) Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin;
- 3) Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan;
- 4) Masih terbatasnya lahan untuk pembangunan air minum komunal.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi di masyarakat. Walaupun mengalami fluktuasi yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir, namun tingkat demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan perhitungan indeks selama tahun-tahun tersebut tetap dalam kategori sedang.

- 2) Kebutuhan akan pentingnya perwujudan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan suasana dan lingkungan yang kondusif. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum menjadi hal yang sangat penting terutama dalam kondisi beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
- 3) Jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya masih belum memenuhi harapan.
- 4) Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah pentingnya pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), dan pendidikan politik masyarakat.
- 5) Diperlukan penguatan terhadap ketersediaan data yang valid sehingga dapat mengukur kondisi ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilakukan intervensi yang tepat untuk menjamin perlindungan masyarakat.

f. Urusan Sosial

- 1) Masih belum optimalnya Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, hal ini terlihat dari data persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
- 2) Masih belum optimalnya Pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal tersebut terlihat dari angka Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan masih relatif rendah
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik melalui sistem perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini terlihat dari

angka persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial

- 4) Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan. Garis kemiskinan yang tinggi ini disumbang dari masih tingginya tingkat harga komoditas pangan dan non pangan yang berada di pedesaan. Kemudian garis kemiskinan provinsi kepulauan Bangka Belitung juga merupakan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia

3.1.1.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Tingginya masyarakat yang bekerja pada sektor primer.
- 3) Rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja.
- 4) Kurangnya kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, dimana tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki. Disparitas antara angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dibanding perempuan sedangkan untuk Rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari pada Perempuan dan untuk pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara laki-laki;
- 2) Adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan hal ini terlihat dari hak kelangsungan hidup anak, Hak Perlindungan anak; Hak Tumbuh Kembang Anak, hak partisipasi anak

berada dan hak identitas anak berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA);

- 3) Tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus. Pada beberapa jenis kasus, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan;
- 4) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

c. Urusan Pangan

- 1) Masih terdapat beberapa daerah yang terindikasi kerawanan pangan;
- 2) Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Belum optimalnya upaya diversifikasi pengolahan hasil pangan lokal.
- 4) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.
- 5) Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau.

d. Urusan Pertanahan

Masih cukup besar ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah bagi penduduk. Tanah sebagai salah satu aset penting yang diperlukan masyarakat tidak saja untuk tempat tinggal tapi juga sebagai tempat berusaha. Sehingga penting untuk memperhatikan pengaturan sedemikian rupa sehingga terwujud distribusi kepemilikan tanah yang adil bagi masyarakat setempat.

e. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam menyebabkan semakin menurunnya daya dukung lingkungan;
- 2) Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

f. Urusan Administari Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Masih rendahnya kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Struktur penduduk pada saat ini didominasi oleh usia produktif dan dalam jangka panjang dapat terjadi peningkatan beban dengan meningkatnya struktur penduduk yang semakin menurun (*aging population*).

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Adanya desa berkategori desa tertinggal.;
- 2) Lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pembangunan desa;
- 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa yang berbasis komoditas lokal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah BUMDes yang ada dan dalam kondisi aktif. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 309 desa yang tersebar di enam kabupaten. Setidaknya setiap desa memiliki BUMDes sebagai wadah untuk mengelola aset, modal desa dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- 4) Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditandai dari menurunnya persentase desa/kelurahan yang berhasil memfasilitas lembaga kemasyarakatan dalam hal pembangunan partisipatif.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi.

i. Urusan Perhubungan

- 1) Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain;
- 2) Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan;
- 3) Masih sempitnya ruas jalan dan lingkaran luar yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan;
- 4) Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan;
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi;

- 3) Adanya daerah dan wilayah blank spot yang tidak memiliki akses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi;
- 4) Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Belum mantapnya sumberdaya manusia koperasi;
- 2) Masih kurangnya bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UKM;
- 3) Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha;
- 4) Belum optimalnya sarana pemasaran produk UKM;
- 5) Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
- 6) Kurangnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
- 7) Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

l. Urusan Penanaman Modal

- 1) Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi yang valid dan terkini;
- 2) Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar,
- 4) Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal ;
- 5) Belum optimalnya penyerahan kewenangan perizinan.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik yang dilihat dari persentase pemuda yang bekerja
- 2) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah.
- 3) Rendahnya tingkat prestasi olahraga di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Klub olah raga dan gedung olah raga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir relatif stagnan, meskipun secara kuantitas cukup banyak. Hal tersebut diikuti pula dengan semakin berkurangnya jumlah event perlombaan olahraga.

n. Urusan Persandian

- 1) Rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi;
- 2) Belum optimalnya operasional koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah;
- 3) Belum optimalnya fungsi komunikasi persandian dalam hal membantu pemda dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang otentik, utuh dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi dalam rangka pengiriman atau penyimpanannya.

o. Urusan Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal yang diarahkan pada pembangunan sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa
- 2) masih lemahnya basis data, informasi dan referensi, rendahnya komitmen, peran dan sinergi pemangku kepentingan pelestarian nilai sejarah dan tradisi, rendahnya apresiasi dan aktualisasi nilai sejarah dan budaya, terbatasnya ruang kreatifitas inovasi dan berfikir positif, menurunnya

pemahaman, penghayatan, pengalaman dan pengembangan nilai-nilai multikultural, rendahnya kapasitas dan ketahanan budaya, rendahnya pemahaman dan pemanfaatan nilai sejarah, nilai budaya dan kearifan lokal, lemahnya kualitas dan efektifitas pranata kebudayaan, rendahnya kuantitas dan kualitas SDM kebudayaan

- 3) masih lemahnya kualitas dan kapasitas, pengembangan dan inovasi, promosi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan serta kemampuan tata kelola dalam pelestarian kebudayaan.
- 4) Masih lemahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, rendahnya pengembangan kreasi dan produksi industri budaya, lemahnya institusi budaya, lemahnya institusi dan pranata yang kondusif, serta lemahnya akses dan manajemen permodalan dalam rangka pelestarian kebudayaan lokal.

p. Urusan Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung pengentasan buta huruf, membudayakan gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat;
- 2) Kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

q. Urusan Kearsipan

- 1) Belum optimalnya sistem tata kelola kearsipan daerah.
- 2) Kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan.

3.1.2. Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;
- 2) Masih marak terjadinya illegal unregulated unreported fishing di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing;
- 4) Masih rendahnya produktifitas dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 5) Masih rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

b. Urusan Pariwisata

- 1) Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
- 3) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
- 4) Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.

c. Urusan Pertanian

- 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya seperti perkebunan, dan pertambangan;
- 2) Belum optimalnya pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian yang dilakukan selama ini dalam mendorong peningkatan produksi pertanian

- 3) Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian;
- 4) Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi hasil pertanian;
- 5) Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan.
- 6) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

d. Urusan Kehutanan

- 1) Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB;
- 2) Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan;
- 4) Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas;
- 5) Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan *illegal logging*, *illegal minning* dalam kawasan hutan;
- 6) Semakin meningkatnya luasan lahan kritis;
- 7) Belum adanya sistem pengelolaan database kehutanan berbasis Teknologi Informasi.

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Kapasitas pembangkit masih di bawah beban puncak;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan energi baru terbarukan sebagai energi alternatif;

- 3) Belum optimalnya hilirisasi sumber daya mineral;
- 4) Belum optimalnya tata kelola timah dari hulu ke hilir.

f. Urusan Perdagangan

- 1) Belum optimalnya pemasaran produk-produk lokal ke luar daerah maupun ke luar negeri;
- 2) Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah;
- 3) Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk lokal daerah;
- 4) Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan maupun komoditas non pangan;
- 5) Kurangnya jiwa *entrepreneur* aparaturnya pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat;
- 6) Belum optimalnya pemberdayaan konsumen dan pembentukan lembaga perlindungan konsumen.

g. Urusan Perindustrian

- 1) Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam;
- 2) Pengembangan industri yang masih terfokus kepada pengembangan industri smelter timah;
- 3) Belum optimalnya pengembangan industri yang berbasis ekonomi kreatif;
- 4) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan;
- 5) Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.

h. Urusan Transmigrasi

Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka panjang daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;
2. Tingginya tingkat pengangguran;
3. Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah;
4. Ketahanan Pangan yang masih rendah;
5. Tingginya tingkat inflasi;
6. Rendahnya peran industri pengolahan sumber daya alam;
7. Peningkatan perbaikan iklim investasi;
8. Belum optimalnya pengembangan budaya local, infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
9. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya manusia;
10. Masih terjadi kesenjangan pembangunan sosial, keadilan kesetaraan gender (KKG) dan pembangunan antar wilayah ;
11. Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat;

12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah terutama di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas serta rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah;
13. Peningkatan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral serta penguatan ketahanan energi;
14. Penanggulangan dampak perubahan iklim dan pemanasan global serta kualitas lingkungan hidup yang masih rendah.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi pembangunan daerah dirumuskan guna menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal suatu daerah dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Memperhatikan bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan panjang daerah, maka visi yang dirumuskan harus dapat mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun.

4.1. Visi

Dalam hal perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025, perumusan visi pembangunan daerah dilandasi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD 2005-2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2007-2012 dan 2012-2017;
2. Identifikasi terhadap isu strategis jangka panjang yang dirumuskan menggunakan pendekatan teknokratik;
3. Masukan dan kesepakatan bersama dari seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil *Focuss Group Discussion* (FGD), Forum Konsultasi Publik dan Forum Musrenbang;
4. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034;
6. Memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya guna melakukan penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya, yang dalam hal ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat.

Berlandaskan beberapa hal sebagaimana dimaksud diatas, maka visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula dan telah dilaksanakan pada tahap I (2005-20012) dan tahap II (2012-2017) adalah **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”**, untuk yang akan dilaksanakan pada tahap III (2017-2022) dan tahap IV (2022-2025) diubah menjadi:

**“TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN TAHUN 2025”**

menjadi

**“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**

Adapun pernyataan visi ini mengandung 4 (empat) makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan** adalah merupakan cerminan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan dan merupakan bagian dari NKRI, untuk turut andil dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif sehingga dapat setara dengan daerah lain di Indonesia, bahkan dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan ketatapemerintahan yang baik.
3. **Sejahtera**, merupakan tujuan pembangunan Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan pemenuhan atas hak-hak dasar masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan yaitu, kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan rasa aman.

4. ***Berwawasan Lingkungan*** adalah berubahnya sikap mental masyarakat yang lebih berorientasi pada kehidupan jangka panjang melalui keinginan yang kuat untuk menjaga kelestarian SDA serta sikap yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Dari pernyataan visi diatas, maka perwujudan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Perwujudan visi 1. Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan untuk maju.
- Perwujudan visi 2. Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan untuk mensejahterakan masyarakat.
- Perwujudan visi 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan yang berwawasan lingkungan.

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas dan dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan pada visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2005 – 2025, yang semula dan telah dilaksanakan pada tahap I (2005-20012) dan tahap II (2012-2017) adalah:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (*good local governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk yang akan dilaksanakan pada tahap III (2017-2022) dan tahap IV (2022-2025) diubah menjadi:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Dengan demikian, maka Visi dan Misi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel IV. 1 berikut:

Tabel. IV.1

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025	1 Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
	2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
	3 Mewujudkan pemerintahan yang amanah
	4 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
	5 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sementara itu, sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran dari setiap misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah:

Misi I : Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari

Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan

keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis agri-bahari

Sasaran : Meningkatnya ekonomi daerah

Misi II : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM.

Misi III : Mewujudkan pemerintahan yang amanah

Tujuan : Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Sasaran : Terlaksananya prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Misi IV : Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Tujuan : Mengurangi kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah

Sasaran : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat

Misi V : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tujuan : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Secara lengkap, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel IV.2.

Tabel IV.2
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025	1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari	1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis agri-bahari	Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	4,11	6,50
	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	2. Mewujudkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,85	72,95
	3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>).	3. Terlaksananya prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.	1. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	72,31	77,50
			2. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,16	70,00
	4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	4. Mengurangi kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,251	0,215
				Indeks Gini	0,288	0,21
	5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,56	68,01

BAB V**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH****5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

Arah kebijakan pembangunan dirumuskan sebagai suatu instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan yang dijabarkan dalam sasaran pokok pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaannya dibagi kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Arah kebijakan tahap I dan II (2005-2017/ sebelum perubahan);
2. Arah kebijakan tahap III dan IV (2020-2025/ setelah perubahan).

Keterkaitan antara Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang tahap I dan tahap II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005-2017/ sebelum perubahan) adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1

Tabel Keterkaitan Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap I dan II (2005-2017)

MISI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Misi 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan	1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PDRB per kapita masyarakat. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA yang berpotensi merusak lingkungan menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif.

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.	<ol style="list-style-type: none">2 Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha dan bekerja serta mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi; komitmen terhadap perjanjian ekonomi internasional dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah; serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi.3 Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat; mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; serta meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal.4 Mendorong percepatan pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi.5 Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah pedesaan merupakan <i>backward linkages</i> dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.6 Pembangunan perkampungan/pedesaan didorong melalui pengembangan agri-bahari terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas SDM di perkampungan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perkampungan dan kota-kota kecamatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi;7 Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor perkebunan dan kelautan dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat menggantikan sektor pertambangan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan, serta
--	---

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. Peningkatan efisiensi, modernisasi, serta nilai tambah perkebunan dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agri-bahari yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.

- 8 Pembangunan perikanan terutama perikanan laut diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya dibatasi oleh laut. Di samping akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat maka pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi sehingga mampu untuk diekspor dan meningkatkan penerimaan daerah.
- 9 Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra provinsi ini sebagai wilayah agri bahari. terbentuknya citra daerah wisata tentu akan memperluas kesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan kepariwisataan dilakukan secara arif dan berkelanjutan terutama memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah bahari yang dikelilingi oleh pantai nan indah.
- 10 Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan dengan terlebih dahulu membangun fondasi kegiatannya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.
- 11 Pengembangan transportasi laut terus ditingkatkan dan diutamakan pada pembangunan pelabuhan sesuai dengan tatanannya dan pengoptimalan fungsi pelabuhan. Sedangkan untuk transportasi darat terus ditata dan dikembangkan termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan. Perluasan ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang.
- 12 Pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada upaya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- 13 Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

	<p>ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari.</p>
	<p>14 Perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi lokal dan memperlancar distribusi dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sistem distribusi yang efisien dan efektif akan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah/negara, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.</p>
	<p>15 Penanaman modal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) mutlak diciptakan. Infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan jasa telekomunikasi adalah prasarana yang sangat menentukan keberhasilan menggandeng investor-investor dari luar.</p>
	<p>16 Jasa-jasa, termasuk jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan informasi serta jasa keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global.</p>
<p>Misi 2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan melalui: peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan akses informasi,</p> <p>2. Pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, harkat dan martabat sehingga mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dan bersaing di era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berkembang di masyarakat dan tanpa diskriminasi, melalui fasilitasi peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; serta perbaikan manajemen pelayanan pendidikan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK.</p> <p>3. Pembangunan IPTEK diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan; pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat; ketahanan pangan dan daya</p>

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

saing daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal; serta memperhatikan sumber daya.

4. Pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mempertahankan Babel Sehat; pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui fasilitasi peningkatan upaya kesehatan masyarakat; pembiayaan kesehatan; pengembangan kualitas dan pendistribusian SDM kesehatan, pengadaan, pendistribusian dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan; promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan gizi masyarakat; pengembangan lingkungan sehat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan pengembangan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat.
6. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan jumlah jaringan serta kualitas puskesmas hingga ke daerah/pulau terpencil dan terisolir melalui peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; upaya pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan ibu/anak/ keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; upaya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; upaya penemuan dan tatalaksana penderita; upaya peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
7. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup yang sehat serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini. Hal ini dimulai dengan memberdayakan lingkungan yang sehat serta memberdayakan manusianya untuk berperilaku atau berpola hidup yang sehat. Sosialisasi kesehatan lingkungan ditunjang dengan pendidikan pola hidup sehat yang dimulai sejak lahir.
8. Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan serta pengembangan sistem jaminan kesehatan

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

	terutama bagi penduduk miskin diarahkan pada upaya menyelenggarakan penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan yang menyeluruh, non diskriminasi dan berkelanjutan.
	9. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
	10. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
Misi 3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah. Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat2. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan penguatan lembaga legislatif.3. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja.4. Kerja sama antardaerah yang berbatasan perlu ditingkatkan guna meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik. Sedangkan kerja sama antar daerah yang tidak berbatasan langsung perlu ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah guna mendorong peningkatan daya saing.5. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokrasi, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis6. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa secara mandiri dalam proses pembangunan.



MISI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

	<p>7. Pembangunan bidang hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) diarahkan pada upaya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan terciptanya kepastian berusaha bagi pelaku usaha.</p>
	<p>8. Pembangunan bidang statistik dan kearsipan diarahkan pada upaya penyediaan data/informasi secara akurat, cepat dan terkini. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan data/informasi/statistik daerah, perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.</p>
	<p>9. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang modern melalui pemanfaatan <i>e-commerce</i> dalam konteks <i>paperless document</i> di lingkungan birokrasi dan proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan melalui kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.</p>
	<p>10. Peningkatan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat diarahkan pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.</p>
	<p>11. Pembangunan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama akan terus dipelihara secara berkelanjutan serta semakin berkembangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Wawasan Kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
	<p>12. Pengembangan budaya politik diarahkan pada upaya penanaman nilai-nilai demokratis bagi masyarakat yang diupayakan melalui: penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media dan upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.</p>
<p>Misi 4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih</p>	<p>1 Keberpihakan pemerintah pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain.</p> <p>2 Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di</p>

MISI DAERAH**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk gender

wilayah/pulau-pulau terpencil dan tertinggal.

- 3 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik.
- 4 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- 5 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan; kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- 6 Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 7 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur yang berkembang di masyarakat seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

MISI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

	8 Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur, meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK.
Misi 5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang	1 Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada upaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
	2 Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup yang sehat serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.
	3 Pengembangan pemukiman penduduk dan penataan ruang kota dilakukan melalui penataan pemukiman yang sudah ada dan pengembangan kota serta desa-desa yang menjadi pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan prasarana, sarana utama dan penunjang.
	4 Kebijakan pengelolaan SDA yang terbarukan seperti hutan dan kelautan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
	5 Pengelolaan SDA tak terbarukan seperti bahan tambang dilaksanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
	6 Pengelolaan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk: (1) menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; (2) mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan <i>demand management</i> yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan <i>supply management</i> yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; dan (3) memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan.
	7 Pengelolaan pertanahan diarahkan pada penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Sementara itu, keterkaitan antara misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada tahap III dan Tahap IV (2017-2025) adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel V.2.

Tabel V.2

Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahapn III dan IV (2017-2025)

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Misi 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari	Meningkatnya ekonomi daerah	1 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
		2 Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
		3 Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
		4 Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
		5 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan SDA;
		6 Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
		7 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
		8 Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
		9 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
		10 Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
		11 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
		12 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
		13 Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		14 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan industri pariwisata;
		15 Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata;
		16 Peningkatan Nilai tambah atas pemanfaatan SDA berbasis kehutanan
Misi 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
Misi 3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat;2. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> didukung dengan pendataan dan perencanaan komprehensif, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil dan sulit dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; serta menekantingkat penyalahgunaan wewenang pada semua lapisan birokrasi;



MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		2. Meningkatkan Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur yang mengarahkan kebijakan keuangan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.
Misi 4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa;2 Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Strategis cepat tumbuh, perbatasan serta daerah potensial lainnya;3 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur;4 Peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi;5 Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi;6 Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;7 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas;8 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik;9 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan;

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		10 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
		11 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga;
		12 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul;
		13 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
		14 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Misi 5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	1 Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang. 2 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

5.2 Tahapan dan Prioritas

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini serta prediksi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dalam 20 tahun mendatang, prioritas pembangunan akan dibagi menjadi 4 tahap pembangunan lima tahunan berdasarkan pendekatan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Penentuan prioritas, tidak berarti bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengabaikan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tidak menjadi prioritas pada periode terkait. Prioritas dalam konteks ini memberikan perhatian utama, tetapi tidak berarti seluruh sumber daya hanya dialokasikan untuk hal yang dianggap prioritas dengan mengesampingkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang lain.

Adapun prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, dibagi berdasarkan:

1. Bidang pembangunan, yang telah dilaksanakan pada tahapan pembangunan I dan II (2005-2017/ sebelum perubahan);
2. Sasaran pokok pembangunan, yang akan dilaksanakan pada tahapan III dan IV (2017-2025/ setelah perubahan).

Secara lengkap, prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel V.3 dan V.4 berikut:

Tabel V.3

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap I dan II (2005-2017)

Bidang Pembangunan	Prioritas Lima Tahunan	
	2005–2012	2012–2017
a. Lingkungan Hidup	II	II
b. SDM & Kependudukan	IV	IV
c. Ekonomi dan SDA	III	I
d. Sosial, Budaya dan Politik	V	VI
e. Prasarana dan sarana	I	III
f. Pemerintahan	VI	V

Sumber: Data olahan dari hasil survey dan *expert judgement*, 2006

Tabel V.4

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017-2022) dan Tahap II (2022-2025)

SasaranPokok	Prioritas Lima Tahunan	
	2017–2022	2022–2025
1. Meningkatnya ekonomi daerah	I	I
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	II	II
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	V	IV
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	IV	III
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	III	V
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	VI	VI

Sumber: Data olahan dari hasil survey dan *expert judgement*, 2016.

Berdasarkan tabel V.2 dan V.3 tersebut, maka pentahapan prioritas pembangunan lima tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

5.2.1. Tahun 2005–2012 (Tahap Pertama)

Pada tahap pertama, fokus pembangunan daerah diarahkan pada penyiapan sarana dan prasarana serta penanganan lingkungan hidup. Bahwa salah satu faktor penting berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Infrastruktur di sini termasuk di dalamnya adalah infrastruktur fisik dan nonfisik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya.

Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah berkaitan dengan penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Penurunan kualitas fisik lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung sudah sangat memprihatinkan dan jika tidak ada kebijakan serta upaya konkrit yang serius dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kondisi ini akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat saat ini dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Lima tahun pertama pada intinya adalah masa persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan tahap berikutnya serta penataan kembali

5.2.2. Tahun 2012–2017 (Tahap Kedua)

Pada tahap kedua, fokus pembangunan difokuskan ekonomi dan lingkungan hidup. Pada tahap ini, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi

ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

5.2.3. Tahun 2017–2022 (Tahap Ketiga)

Pada tahap lima tahun ketiga, prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pada tahapan ini, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, perhatian perlu diberikan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi perhatian dan tumpuan utama. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa

menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;

5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
 15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Pada sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

5.2.4. Tahun 2022–2025 (Tahap Keempat)

Pada tahap lima tahun keempat perjalanan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia, meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi serta meningkatkan rasio belanja publik terhadap belanja aparatur.

Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah pada tahap ini adalah penguatan sektor industri melalui perluasan akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional dan promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung. Sementara itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia diarahkan dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah. Sebagai contoh: pengembangan sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan kekayaan alam.

Berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, berbagai aspek yang terkait dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi pada khususnya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang semakin pesat. Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Berbagai dampak negative atau eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan, kesempatan berusaha dan sebagainya harus dijadikan perhatian untuk dituntaskan dan ditangani.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, oleh karenanya harus dipastikan pada akhir perencanaan 20 tahun pembangunan, tujuan untuk menciptakan Kepulauan Bangka Belitung yang maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan akan terwujud.

Pada akhir tahap keempat ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB ditargetkan tumbuh sebesar 6,50

sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,95, Indeks Demokrasi Indonesia meningkat menjadi 77,50 dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 70,00.

Agar sasaran pokok pembangunan tahap keempat ini dapat terwujud, maka:

- a. Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 2. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 3. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 4. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 5. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 6. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 7. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 8. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 11. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 12. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 13. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
 14. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;

15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Pada sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- c. Pada sasaran pokok meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
 1. Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat;
 2. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
3. Sasaran pokok Indeks Reformasi Birokrasi, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* didukung dengan pendataan dan perencanaan komprehensif penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil dan susah dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang pada semua lapisan birokrasi;

2. Meningkatkan Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur yang mengarahkan kebijakan keuangan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka target dari indikator sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap tahapannya adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel V.4 berikut:

Tabel V.4

Sasaran Pokok, Indikator Sasaran Pokok, Target Indikator Sasaran Pembangunan 2017-2025 dan Realisasi Indikator Sasaran Pembangunan 2005-2017

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan (2016)	Realisasi		Target		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan (2025)
			Tahap I (2007-2012)	Tahap II (2012-2017)	Tahap III (2017-2022)	Tahap IV (2022-2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
1. Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	4,11	5,50	4,25	5,25	6,50	6,50
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,85	67,21	69,85	71,05	72,95	72,95
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	72,31	69,37	72,31	76,00	77,50	77,50
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,16	n.a.	63,16	67,00	70,00	70,00
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,251	0,284	0,251	0,236	0,215	0,215
	Indeks Gini	0,288	0,29	0,27	0,24	0,21	0,21
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,56	58,17	61,56	64,32	68,01	68,01

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan Visi, Misi dan Program calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. Penyusunan RPJM Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten /Kota, RPJM Daerah Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota;
4. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah Pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk Dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan Pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
 3. Sekrearis Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
 4. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan ,strategi, kebijakan ,program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, Kegiatan beserta pendanaan;
 5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitas dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 kedalam rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah ;

7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
8. Menyusun kesepakatan bersama (*MOU*) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
8. Hasil pelaksanaan pengawasan intern pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
9. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149

Website : bappeda.babelprov.go.id
Email : bappeda.provbabel@yahoo.com